
**MENJAWAB
TANTANGAN
ABAD 21**

MENJAWAB TANTANGAN ABAD 21

Tulisan ini dipersiapkan dalam rangka Apel Komandan Satuan Terpusat TNI-AD, 1 Maret 2013

PENGANTAR

Pada kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama mencermati perkembangan situasi dunia dewasa ini yang sangat dinamis dan penuh dengan ketidakpastian atau *"uncertainty"*. Pertama-tama saya akan menyampaikan sejumlah pandangan tentang perkembangan geopolitik, baik pada lingkup global maupun regional. Selanjutnya saya akan mengelaborasi sejumlah fitur utama abad 21, sehingga kita dapat lebih baik mengidentifikasi dan memahami berbagai peluang yang perlu kita rebut dan tantangan-tantangan yang harus kita antisipasi. Dalam setiap pembahasan tentunya akan dibarengi dengan sejumlah proposisi yang relevan untuk dapat menjawab berbagai tantangan yang telah kita identifikasi tersebut. Semua pandangan yang akan saya kemukakan merupakan *"personal view"*, yang saya dapatkan melalui observasi saya selama kurang lebih 12 tahun berdinamika di jajaran TNI-AD, dan juga observasi saya selama mengikuti pendidikan formal maupun forum-forum akademis lainnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendefinisikan geopolitik sebagai "Dinamika Hubungan Internasional antar negara dan bangsa di suatu kawasan (geografi) tertentu, yang meliputi dan berpengaruh pada politik, ekonomi, keamanan dan aspek-aspek lainnya". Jika memahami definisi ini maka pembahasan geopolitik tidak akan terlepas dari apa yang terjadi di dunia saat ini, dan apa saja implikasinya terhadap situasi regional dan nasional kita. Dunia bergerak dengan sangat cepat. Wajah dunia saat ini sungguh berbeda dibandingkan dengan 15 tahun yang lalu. Revolusi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, atau *"Information and Communications Technology"* (ICT) telah menjadikan dunia kita semakin *"flat"* dan terhubung. Inilah hakikat globalisasi. Kita merasakan bahwa saat ini hampir tidak ada *"barrier"* yang dapat memisahkan masyarakat dunia. Fenomena ini tentu tidak terbayangkan oleh generasi-generasi sebelumnya.

Globalisasi yang telah menjadi fitur utama abad 21 ini, membawa begitu banyak peluang, namun juga menghadirkan berbagai tantangan. Dengan globalisasi, dunia menjadi semakin transparan dan kompetitif. Suka atau tidak suka, kita harus menyadari bahwa globalisasi akan menjadi bagian dari kehidupan kita seterusnya. Jika kita tidak siap untuk menghadapinya, maka kita hanya akan menjadi bangsa yang kalah.

PASCA PERANG DUNIA: PERANG DINGIN DAN REZIM "BIPOLAR"

Sebelum membahas lebih jauh fenomena-fenomena abad 21, mari kita sejenak melakukan kilas balik, atau *"flashback"*, sehingga kita dapat mengapresiasi dengan benar posisi kita saat ini. Terdapat sejumlah peristiwa penting, atau *"milestone"* yang menentukan, yang telah merubah sejarah dunia dari era ke era. Setelah Perang Dunia II berakhir di tahun 1945, dunia masuk ke dalam sebuah era baru. Amerika Serikat dan Uni Soviet,



Peta Eropa yang terbagi dalam dua blok selama Perang Dingin

pemenang Perang Dunia II, muncul sebagai dua negara *"superpower"*. Pertentangan serta persaingan merebut pengaruh dunia atas dasar ideologi yang begitu tajam antara kedua negara tersebut telah menciptakan Perang Dingin, atau *"Cold War"*, yang berkepanjangan. Amerika Serikat mengusung paham kapitalisme, sedangkan Uni Soviet mengusung paham komunisme. Situasi ini telah merubah konstelasi geopolitik dan *"balance of power"*¹. Benua Eropa terbagi menjadi

dua bagian besar, dimana Eropa Barat berada di bawah pengaruh atau *"sphere of influence"* Amerika Serikat, dan Eropa Timur dan Tengah berada di bawah kendali Uni Soviet. Kecemasan Amerika Serikat terhadap meluasnya pengaruh dan kekuatan Uni Soviet di Eropa, telah mendorongnya membentuk sebuah arsitektur aliansi militer, atau pakta pertahanan yang diberi nama *North Atlantic Treaty Organization* (NATO), yang beranggotakan negara-negara sekutu Eropa Barat.

NATO yang dibentuk pada tahun 1949, pada hakikatnya merupakan sistem pertahanan bersama atau *"collective defense"* dimana seluruh anggotanya menyelenggarakan *"mutual defense"* dalam rangka menghadapi ancaman agresi Uni Soviet, maupun berbagai bentuk ancaman keamanan eksternal lainnya. Dengan berdirinya NATO, Amerika Serikat berhasil mengkonsolidasikan kekuatannya di wilayah Eropa Barat tersebut. Untuk menandingi NATO, dan sebagai *"military response"* terhadap bergabungnya Jerman Barat ke dalam NATO, Uni Soviet pada tahun 1955 memformulasikan sebuah pakta pertahanan yang diberi nama *Warsaw Treaty Organization of Friendship, Cooperation, and Mutual Assistance*, atau lebih dikenal sebagai Pakta Warsawa. Pakta Warsawa yang beranggotakan negara-negara komunis Eropa Timur, pada prinsipnya dibangun dalam rangka mencegah terjadinya invasi militer yang dilakukan oleh kekuatan Barat. Dengan terbentuknya Pakta Warsawa, maka persaingan antara

kedua negara adidaya tersebut menjadi semakin meruncing. Kalau kita potret dunia saat itu, maka dunia berada dalam sebuah rezim *"Bipolar"*, dimana seolah-olah dunia terbagi menjadi dua kutub besar, yaitu Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan NATO-nya dan Blok Timur yang dikomandoi oleh Uni Soviet dengan Pakta Warsawa-nya.

Persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak berhenti di pembentukan pakta pertahanan. Selama Perang Dingin berlangsung, kedua negara tersebut beserta aliansinya berlomba-lomba untuk memiliki kekuatan militer yang besar untuk dapat saling mengungguli. Perlombaan persenjataan yang lebih dikenal dengan *"Arms Race"* menjadi norma yang berlaku saat itu. Artinya semua *"resources"* dan upaya dikerahkan dan diprioritaskan untuk membangun mesin-mesin perang yang paling mutakhir. Berbagai kegiatan mata-mata, atau *"spy"* dan *"intelligence operations"* juga dilakukan untuk saling

¹ *"balance of power"*

Istilah *"balance of power"* atau disebut juga perimbangan kekuatan dipopulerkan oleh Kenneth Waltz pada saat terjadinya Perang Dingin.



Senjata nuklir sebagai kekuatan “deterrence”

“mengintip” apa yang sedang dibangun dan dikembangkan oleh pihak lawan. Tetapi yang paling mengkhawatirkan dari perlombaan persenjataan ini adalah pengembangan dan proliferasi kemampuan nuklir sebagai kekuatan “deterrence”² kedua belah pihak, yang dibarengi dengan strategi dan doktrin “Mutually Assured Destruction” (MAD). MAD mengandung arti bahwa ketika kekuatan nuklir digunakan oleh kedua belah pihak yang berperang secara total atau “full-scale” maka dapat dipastikan akan terjadi kehancuran total,

dimana tidak ada pihak yang akan menjadi pemenang. Seiring waktu, perkembangan teknologi dan sistem senjata nuklir yang begitu pesat telah membuat dunia berada dalam situasi yang semakin tegang. Dunia cukup “beruntung”, karena walaupun selama Perang Dingin telah terjadi sejumlah perang yang lebih bersifat “proxy”³, seperti Perang Korea dan Perang Vietnam, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet dapat secara rasional mencegah terjadinya pertukaran nuklir yang dapat membinasakan peradaban manusia.

² “Deterrence”

Konsep “deterrence” dapat diartikan sebagai upaya suatu pihak untuk menggentarkan pihak lain dalam mencapai tujuannya.

³ “Proxy”

Perang yang bersifat “proxy” dapat diartikan sebagai perang dimana pihak-pihak yang bertikai tidak terlibat kontak fisik (militer vs. militer) secara langsung; mereka biasanya menggunakan pihak lain sebagai pelaku perang.

BERAKHIRNYA PERANG DINGIN: AMERIKA SERIKAT SEBAGAI “THE ONLY SUPERPOWER”

Sistem ekonomi, tata negara dan pemerintahan Uni Soviet yang sangat tertutup telah menghadirkan begitu banyak permasalahan, termasuk aspek sosial, di dalam negeri. Oleh karena itu pada paruh kedua periode 1980an, diintroduksi sebuah kebijakan baru yang mengusung prinsip-prinsip keterbukaan dan transparansi, yang dikenal dengan “Glasnost”, yang dikawinkan dengan kebijakan “Perestroika”, atau restrukturisasi.

Namun demikian langkah ini juga tidak mampu mencegah runtuhnya ekonomi Uni Soviet. Dalam kondisi yang semakin terpuruk dan bangkrut, negara tersebut tidak lagi mampu mengimbangi, apalagi menandingi rival sejatinya, Amerika Serikat, dalam perlombaan persenjataan yang terus berlangsung.

Ditandai dengan runtuhnya Tembok Berlin, pada tahun 1989 kedua pemimpin negara adidaya akhirnya menyatakan Perang Dingin telah

berakhir. Berakhirnya Perang Dingin tersebut dirayakan oleh seluruh bangsa di dunia, dengan suatu harapan besar bahwa dunia menjadi lebih aman, lebih stabil dan “more predictable”.



Runtuhnya Tembok Berlin sebagai simbol berakhirnya Perang Dingin

Dan dengan berakhirnya Perang Dingin, memberikan peluang terutama bagi negara-negara yang terlibat di dalamnya, untuk mengurangi secara signifikan “defense budget” atau anggaran belanja militernya. Dengan demikian mereka dapat mengalokasikan anggaran negara masing-masing untuk prioritas-prioritas lainnya, khususnya pembangunan ekonomi. Inilah yang mereka sebut dengan “peace dividend”, dimana dalam konteks

"guns versus butter theory", situasi damai telah memungkinkan mereka untuk menempatkan kebutuhan pemenuhan "butter" (aspek ekonomi) di atas kepentingan pembelian "guns" (aspek militer).

Di satu sisi, kemenangan Amerika Serikat dalam Perang Dingin ini telah menempatkan negara tersebut sebagai "the only superpower in the world". Ini merupakan penggalan sejarah penting, dimana rezim dunia berubah dari "Bipolar" menjadi "Unipolar". Amerika Serikat yang tidak tertandingi oleh siapapun saat itu semakin memperbesar pengaruhnya ke seluruh dunia. Pengaruh yang dimaksud meliputi semua aspek strategis, baik politik, ekonomi, militer, termasuk budaya. Dan sebagai negara adidaya satu-satunya, Amerika Serikat berupaya untuk menjadi penentu terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia. Bahkan seolah-olah ingin menjadi "polisi dunia", yang dapat mengintervensi permasalahan-permasalahan internal suatu "sovereign nation-state". Politik luar negeri Amerika Serikat tersebut

tentu menuai pro dan kontra. Namun demikian, ketika itu tidak ada kekuatan manapun yang dapat men-challenge apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Peristiwa penting pasca Perang Dingin yang cukup bersejarah adalah terjadinya Perang Teluk pada tahun 1990-1991, dimana Amerika Serikat memimpin pasukan koalisi (34 negara) yang diotorisasi oleh PBB, untuk membantu militer Kuwait memukul mundur kekuatan militer Iraq yang dipimpin oleh Saddam Hussein. Dalam waktu yang relatif singkat, Kuwait berhasil dibebaskan dari invasi militer Iraq. Salah satu faktor utama kemenangan pasukan koalisi adalah penggunaan teknologi persenjataan mutakhir yang menjamin tingkat akurasi yang tinggi, sehingga dapat melumpuhkan sasaran-sasaran terpilih secara cepat. Kecanggihan sistem senjata yang digunakan oleh Amerika Serikat merupakan "output" penting dari "Revolution in Military Affairs"⁴ (RMA) yang mereka lakukan sebelumnya.

⁴ "Revolution in Military Affairs"

Revolusi dalam bidang militer, tidak hanya mencakup pada pengembangan / pemutakhiran teknologi militer namun juga meliputi aspek doktrin dan organisasi sesuai dengan perubahan atau dinamika lingkungan strategis baik pada tataran global, regional maupun nasional.



Perang Teluk dimana militer Amerika Serikat dengan sistem persenjataan yang canggih mendominasi setiap ruang pertempuran

Selama berlangsungnya Perang Teluk, Amerika Serikat secara mutlak telah mendominasi setiap ruang pertempuran, baik di darat, di laut maupun di udara melalui penggunaan satelit, teknologi komunikasi yang canggih, dan berbagai jenis persenjataan yang memiliki keunggulan dalam hal jarak capai, akurasi dan daya hancur. Penggunaan "precision-guided munitions"⁵ dinilai sangat efektif, sehingga kemungkinan terjadinya korban di pihak masyarakat sipil,

termasuk "collateral damage"⁶, secara signifikan berkurang, jika dibandingkan dengan perang-perang sebelumnya. Di samping itu, satu hal yang cukup berbeda dari perang-perang sebelumnya adalah peran media yang begitu besar dalam meliput suasana perang yang tengah berlangsung secara "live" 24 jam. Untuk pertama kalinya masyarakat dunia dapat menyaksikan secara langsung apa yang terjadi di zona perang, baik serangan udara, tembakan-

⁵ "Precision-guided munitions"

Persenjataan yang memiliki tingkat presisi atau akurasi yang sangat tinggi untuk dapat secara langsung mengenai dan atau melumpuhkan sasaran yang dituju, sehingga mereduksi kemungkinan terjadinya "collateral damage".

⁶ "Collateral damage"

Kerusakan yang berlebihan yang diakibatkan dari suatu perang atau operasi militer, dimana tidak hanya meliputi korban jiwa manusia (warga sipil atau non-kombatan) namun juga properti dalam jumlah yang besar; dalam hukum perang internasional hal ini diperbolehkan untuk mengakhiri suatu perang.

tembakan misil, maupun pasukan militer Iraq yang menyerah tanpa syarat. “Media coverage” yang begitu luas ini telah membawa dampak tersendiri bagi dunia. Layaknya menyaksikan pemutaran sebuah film di bioskop, pasti setiap penonton akan memiliki perspektif dan pendapatnya masing-masing terhadap tokoh dan alur cerita film tersebut. Artinya, tentu menuai pro dan kontra.

Selama kurang lebih satu dekade lamanya pasca Perang Dingin, Amerika Serikat membangun “hegemony” atau dominasinya ke seluruh belahan dunia, termasuk ke kawasan yang secara historis berada di bawah pengaruh Uni



⁷ “Soft-power”

Sebuah jenis kekuatan untuk memperoleh dan atau mengembangkan pengaruh di suatu negara atau kawasan tertentu tanpa menggunakan instrumen militer; biasanya dilakukan melalui diplomasi dan kebijakan luar negeri yang efektif, serta melalui pendekatan “people-to-people contact”.

Soviet. Dengan mengedepankan kebijakan politik luar negeri melalui pendekatan “soft power”⁷, negara tersebut berupaya untuk “menjual” paham dan fundamental kapitalisme yang mereka yakini sebagai kebenaran yang absolut. Di samping itu Amerika Serikat juga menjadi pionir dalam kampanye Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Kedua agenda ini yang telah menjustifikasi mereka di dalam mengambil sejumlah keputusan kontroversial untuk mengintervensi suatu negara atau kawasan yang mereka anggap memiliki kepentingan strategis bagi negaranya. Dampaknya, Amerika Serikat banyak mendapatkan pertentangan-pertentangan yang berasal dari “state” maupun “non-state actors”⁸ di berbagai belahan dunia.

Media coverage yang begitu luas semasa Perang Teluk berlangsung

⁸ “Non-State actors”

Aktor bukan negara yang meliputi organisasi internasional dan regional, individu, kelompok-kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perusahaan multinasional dan aktor transnasional.



Kepanikan warga New York City sesaat terjadinya serangan terhadap gedung WTC pada 9/11

SERANGAN 9/11 : TERORISME DAN PERANG ASIMETRIS

“Milestone” berikutnya adalah ketika pada tanggal 11 September 2001, di awal abad 21, kurang dari dua tahun semenjak dunia merayakan pergantian milenium, Amerika Serikat mendapatkan serangan yang sama sekali tidak terbayangkan oleh siapapun sebelumnya. Sebuah serangan teroris yang terencana dan dieksekusi dengan matang oleh kelompok radikal Al-Qaeda pimpinan Osama Bin Laden, telah membuka mata masyarakat dunia. Bagaimana tidak, dengan hanya bermodalkan kecerdasan, kesabaran

dan perhitungan yang cermat, sekelompok operator berhasil menjadikan maskapai penerbangan sipil milik Amerika Serikat sebagai senjata yang sangat mematikan. Dalam waktu sekejap simbol-simbol kekuatan Amerika Serikat dapat dilumpuhkan. “World Trade Center” yang merupakan simbol kekuatan ekonomi dan “Pentagon” yang merupakan simbol kekuatan militer, dihantam oleh tiga pesawat yang dibajak dan dijadikan sebagai bom bunuh diri. Ada satu pesawat lagi yang sebenarnya ditargetkan untuk menghantam salah satu di antara dua simbol kekuatan politik Amerika Serikat, yaitu istana kepresidenan, “the White House”, dan gedung parlemen, “the Capitol”.



Pemimpin Al-Qaeda, Osama Bin Laden

Terhitung setidaknya ada 3.000 warga sipil yang menjadi korban dari aksi teroris tersebut. Di luar korban jiwa manusia yang tak ternilai harganya, negara tersebut juga menderita kerugian material yang luar biasa. Sekali lagi tragedi ini merupakan sesuatu yang sangat fenomenal dalam konteks era modern, dimana masyarakat dunia sudah tidak terbiasa untuk melihat ribuan manusia menjadi korban hanya dalam hitungan menit dan terjadi dalam satu *event*. Mungkin situasi yang serupa tidak terlalu mengagetkan jika terjadi pada masa Perang Dunia yang lalu. Selain kerugian jiwa dan material, sesungguhnya yang lebih mendasar adalah berkembangnya perasaan takut yang berlebihan atau *“extreme fear”* di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya di Amerika Serikat tapi juga di seluruh penjuru dunia, untuk menjalani kehidupan dan aktivitasnya sehari-hari. Karena mereka berpikir bahwa Amerika Serikat saja yang begitu digdaya, dengan sistem keamanan dan pengamanan warga negaranya yang

sangat canggih dan ketat, masih dapat ditembus oleh hanya 19 orang operator. Wajar saja, hampir semua orang seketika itu merasa takut untuk berpergian, terutama dengan menggunakan pesawat terbang. Tidak sedikit pula yang menghindari pusat-pusat keramaian, gedung-gedung pemerintahan, dan simbol-simbol negara lainnya. Pendek kata, serangan teroris yang telah dilancarkan, sangat efektif dalam melumpuhkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

Dengan skala kerugian fisik dan dampak psikologi yang begitu besar, aksi teror sekelas 9/11 tersebut ternyata telah menginspirasi puluhan kelompok radikal di dunia untuk meniru “keberhasilan” Al-Qaeda tersebut. Osama Bin Laden sekejap menjadi *“superstar”* dan pahlawan bagi mereka. Ia dielu-elukan tidak hanya karena kecerdasannya, tapi juga keberaniannya untuk mendeklarasikan perang melawan Amerika Serikat dan dunia Barat. Tidak terbayangkan sebelumnya ada

aktor bukan negara atau *“non-state actor”* yang berani men-*challenge* sebuah negara adidaya. Kejadian 9/11 telah menebarkan pesan yang kuat kepada seluruh dunia bahwa di zaman modern ini tidak ada yang tidak mungkin, dan sebuah pertempuran atau perang dapat terjadi secara asimetris.

Tentu fenomena ini sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya, baik era pra-modern, era Perang Dunia I dan II, maupun era Perang Dingin, dimana segala sesuatunya bersifat simetris. Norma yang berlaku sebelumnya, suatu konflik atau perang yang terjadi adalah antara negara melawan negara lainnya, antara kekuatan militer

reguler melawan kekuatan militer reguler lainnya, atau sering disebut sebagai *“force on force”*. Dan biasanya, dalam kalkulasi yang rasional, maka negara dengan kekuatan militer yang lebih besarlah yang lebih berpotensi menjadi pemenangnya. Namun Osama Bin Laden dan Al-Qaeda telah membuktikan dan menegaskan bahwa untuk dapat menjadi pemenang dalam sebuah perang asimetris, yang dibutuhkan hanyalah kecerdasan, kesabaran, kecermatan dan keberanian. Mereka tahu benar bahwa dengan senjata, mereka tidak akan pernah mungkin melawan apalagi mengalahkan negara dengan kekuatan militer yang tak tertandingi di dunia, tetapi mereka



Perang asimetris menjadi norma baru di abad 21

meyakini bahwa dengan kombinasi keempat faktor tersebut di atas, siapapun dapat menjadi kekuatan yang mematikan.

Peristiwa 9/11 terjadi di saat dunia tengah menikmati perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu fenomenal. Tidak mengherankan jika apa yang terjadi di New York City dan Washington DC pagi itu, secara cepat dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dunia. Berbagai pemberitaan media massa, yang dilengkapi dengan foto dan video yang menangkap dan merekam kejadian tersebut segera tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bahkan tidak sedikit dokumentasi amatiran yang di-*upload* ke internet sehingga dapat langsung diakses oleh mereka yang aktif di dunia maya. Dalam konteks ini, sebenarnya teroris diuntungkan dengan gencarnya pemberitaan media, yang juga didukung oleh semakin dalamnya penetrasi internet di tengah-tengah masyarakat dunia.

Mengapa diuntungkan? Karena sejatinya teroris melakukan segala aksinya untuk menebar teror dalam rangka mencapai tujuan politik tertentu. Artinya yang paling penting adalah penyebaran pesan secara kuat sehingga publik, khususnya mereka yang menjadi target dapat mengetahui keinginan atau kepentingan teroris yang harus segera diatensi dan atau dipenuhi. Sebenarnya aksi teror bukanlah sesuatu yang baru. Pada awalnya, teror digunakan sebagai taktik, sama halnya dengan taktik gerilya yang dikembangkan oleh kekuatan kecil dalam rangka melawan kekuatan yang lebih besar. Dalam perkembangannya, aksi teror digunakan sebagai cara dalam mencapai tujuan politik. Sehingga tidak berlebihan jika Brian Jenkins, seorang *expert* di bidang terorisme mengatakan, *"Terrorists want a lot of people watching, not a lot of people dead"*, atau sesungguhnya teroris lebih menginginkan banyak orang melihat, bukan banyak orang yang mati. Namun demikian, banyak yang mengatakan bahwa telah

terjadi pergeseran yang cukup fundamental di era globalisasi dan revolusi informasi dewasa ini, dimana *"Terrorists want a lot of people watching and a lot of people dead"*. Artinya bagi teroris akan lebih menguntungkan, dan semakin memperkuat pesan yang ingin disampaikan, jika banyak orang yang melihat korban dalam jumlah yang besar sebagai aksi yang mereka lakukan.

PERANG MELAWAN TERORISME DAN "CLASH OF CIVILIZATIONS"⁹

Tidak menunggu waktu yang lama setelah "diserang" di tanah airnya sendiri, Amerika Serikat yang didukung penuh oleh rakyatnya mengumumkan perang melawan terorisme. Mereka bahkan mengajak dunia untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam *"Global War on Terror"*. Target mereka sangat jelas, yaitu untuk menangkap dan atau membunuh Osama Bin Laden yang dianggap paling bertanggung jawab, serta



Amerika Serikat memimpin pasukan koalisi di Afghanistan dalam rangka melumpuhkan Al-Qaeda dan Taliban

melumpuhkan sel-sel Al-Qaeda di seluruh dunia. Pada bulan Oktober 2001 pasukan dalam jumlah yang besar segera dikerahkan ke Afghanistan yang dianggap sebagai *"safe haven"*¹⁰ bagi Osama Bin Laden dan Al-Qaeda. *"Bush Doctrine"*, dengan pilar utamanya *"pre-emptive strike"*¹¹ terhadap musuh potensial, dan *"democratic regime change"*, atau intervensi dalam rangka perubahan suatu rezim menjadi demokrasi, dijadikan sebagai pedoman utama bagi Amerika Serikat dan sekutunya dalam perang melawan terorisme. Anggaran pertahanan Amerika Serikat yang berkurang secara

⁹ "Clash of Civilizations"

Pertentangan antar peradaban yang terjadi akibat perbedaan identitas antar bangsa, agama maupun ideologi, dimana berimplikasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia; konsep tentang ini pertama kali diperkenalkan oleh Samuel Huntington dalam tesisnya yang berjudul "Clash of Civilizations".

¹⁰ "safe haven"

Tempat yang aman untuk menjadi persembunyian aktor atau kelompok tertentu pelaku berbagai tindak kejahatan transnasional.

¹¹ "Pre-emptive strike"

Salah satu doktrin militer dimana untuk mencegah terjadinya perang yang lebih besar serta untuk meminimalkan kerugian di pihak sendiri, maka sebuah militer melancarkan serangan terlebih dahulu ke pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh mereka baik yang sifatnya aktual maupun potensial.

signifikan pasca Perang Dingin, dinaikkan secara drastis dalam rangka membiayai produksi mesin-mesin perang serta pengerahan dan penggelaran pasukan di teater operasi.

Di tengah bergulirnya perang di Afghanistan, atas justifikasi yang mereka buat sendiri, Amerika Serikat melakukan serangan “pre-emptive” terhadap Iraq, yang mereka duga menyimpan senjata pemusnah masal, atau “*Weapons of Mass Destruction*” (WMD). WMD tersebut dianggap sebagai ancaman bagi keamanan Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Timur Tengah. Di sisi lain Saddam Hussein dianggap sebagai salah satu aktor penting pendukung Al-Qaeda. Oleh karena itu secara unilateral, pada bulan Maret 2003 Amerika Serikat memimpin sejumlah negara koalisi melakukan invasi ke Iraq. Hanya dalam kurun waktu 21 hari, Baghdad dapat dikuasai oleh pasukan koalisi, rezim Saddam Hussein pun dapat ditumbangkan. Namun perang tidak berhenti di situ. Setelah Baghdad diduduki, pertempuran



Pertempuran yang terjadi antara militer Amerika Serikat dan Iraq

sebenarnya barulah dimulai. Pasukan koalisi harus terlibat dalam pertempuran-pertempuran level taktis menghadapi insurjensi yang tersebar di seluruh wilayah Iraq. Seiring dengan waktu, pasukan Amerika Serikat yang gagal membuktikan dugaan mereka tentang keberadaan WMD, menderita kerugian jiwa yang tidak sedikit setiap bulannya. Situasi di teater operasi juga semakin tidak menentu, karena secara internal populasi Iraq terkotak-kotak berdasarkan paham agama Islam yang beragam. Ribuan warga sipil setempat telah menjadi korban atas perang yang berlangsung selama kurang lebih 8 tahun tersebut.

Kembali ke Afghanistan, upaya pasukan koalisi dalam pencarian Osama Bin Laden ternyata menemui begitu banyak hambatan dan tantangan. Yang pertama, walaupun dengan dukungan peralatan tempur dan teknologi yang canggih, kondisi medan dan cuaca di Afghanistan yang sangat keras dan tidak bersahabat menjadikan tantangan utama bagi pasukan koalisi dalam melaksanakan operasi militer. Yang kedua, pasukan koalisi secara bersamaan harus berhadapan dengan Al-Qaeda dan Taliban yang tersebar di seluruh wilayah dan juga di tengah-tengah masyarakat. Ternyata “*low-intensity warfare*”¹², termasuk di dalamnya adalah “*counterinsurgency*”¹³ sangatlah kompleks dan membutuhkan lebih dari sekedar operasi militer. Hampir sama seperti di Iraq, pasukan koalisi tak terhindar dari kerugian-kerugian personel dan material dalam pertempuran-pertempuran level taktis. Yang ketiga, situasi menjadi semakin rumit ketika ternyata “*safe*

haven” Al-Qaeda tidak hanya di Afghanistan, tetapi juga di Pakistan. Hal ini terbukti setelah pasukan khusus Amerika Serikat pada bulan Mei 2011 akhirnya berhasil menembak mati Osama Bin Laden di kota Abbottabad, yang berlokasi tidak begitu jauh dari ibukota Pakistan, Islamabad.

Walaupun drama pencarian pimpinan Al-Qaeda telah berakhir, tetapi pelajaran berharga yang dapat dipetik adalah bahwa ternyata



Peta operasi pasukan koalisi (ISAF) di Afghanistan

dibutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 10 tahun, bagi

¹² “Low-intensity warfare”

Jenis peperangan dimana skala pelibatan kekuatan maupun potensi kehancurannya relatif kecil dibandingkan dengan perang konvensional antara dua kekuatan militer; namun biasanya resolusi untuk mengakhirinya jauh lebih kompleks dan membutuhkan waktu yang panjang.

¹³ “Counterinsurgency”

Operasi Lawan Insurjensi (OLI), merupakan operasi militer melawan pihak-pihak insurjen yang berusaha memisahkan diri dari suatu negara atau melawan kepemimpinan negara yang sah.



Patroli para gerilyawan Taliban

pasukan militer Amerika Serikat dan koalisinya yang begitu kuat dan modern, untuk menemukan dan melumpuhkan seorang bernama Osama Bin Laden. Artinya sekali lagi, dalam sebuah skenario asimetris, sangat sulit diprediksi berapa waktu, berapa jumlah pasukan, dan berapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk dapat memenangkannya. Bahkan walaupun pucuk pimpinan Al-Qaeda telah berhasil dilumpuhkan, tidak berarti perang melawan terorisme dinyatakan usai. Masih banyak agenda yang harus dituntaskan untuk mengembalikan stabilitas

keamanan secara keseluruhan di kawasan tersebut. Dan itu semua tidak cukup dilakukan dengan hanya pengerahan kekuatan militer. Pendekatan keamanan harus dibarengi dengan pendekatan-pendekatan lain yang terintegrasi dan tersinkronisasi dengan baik. Dan pada akhirnya Amerika Serikat termasuk negara-negara sekutunya harus banyak belajar dari sejarah bahwa untuk memperkenalkan suatu nilai ke dalam sebuah masyarakat atau bangsa tidak dapat dilakukan secara instan. Membutuhkan waktu yang panjang, tidak cukup waktu satu atau dua dekade. Dan upaya

itu harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, serta melalui sebuah proses yang melibatkan semua komponen masyarakat atau bangsa tersebut. Karena pada hakikatnya sebuah masyarakat atau bangsa telah terbentuk sejak ratusan bahkan ribuan tahun, dimana selama itu pula telah memiliki nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Oleh karena itu upaya Amerika Serikat dan negara-negara Barat untuk menancapkan nilai-nilai serta praktik-praktik demokrasi dan hak asasi manusia di sebuah bangsa dengan didahului oleh perang, pasti akan mengalami kegagalan.

Yang menarik, sekaligus mengkhawatirkan, dari kedua cerita perang di abad 21 ini adalah bahwa apa yang diharapkan oleh masyarakat dunia saat berakhirnya Perang Dingin yang lalu, yaitu situasi dunia yang semakin aman dan stabil, tidak terwujud. Memang saat ini kita tidak lagi menyaksikan pertentangan ideologi antara kapitalisme dan komunisme ala Perang Dingin, tetapi fenomena

berkembangnya gerakan-gerakan radikal yang (kebetulan) berbasiskan agama Islam, telah membuat seolah-olah dunia terpecah lagi. Artinya tanpa disadari terjadi kembali suatu pergeseran dalam konstelasi geopolitik yang jauh lebih kompleks. Yang lebih celaka adalah bahwa dengan mengikuti perkembangan berbagai insiden terorisme yang dilakoni oleh kelompok-kelompok radikal berbasis Islam dewasa ini, banyak elemen masyarakat dunia yang dengan mudahnya menyamakan Islam dengan Teroris. Hal ini tentu sangat berbahaya, karena sangat mungkin akan terjadi "*clash of civilizations*", antara Dunia Barat dan Dunia Islam.

TERORISME DI INDONESIA : PENTINGNYA KOLABORASI DAN SINERGI SELURUH KOMPONEN BANGSA

Tentu semua umat Islam di dunia tidak akan menerima jika agama yang dianutnya dicap sebagai agama yang penuh dengan kekerasan dan kebencian.



Kehancuran akibat serangan bom bunuh diri di Bali

Agama Islam, seperti agama lainnya, tentu hanya mengajarkan kebaikan-kebaikan dan kedamaian bagi umatnya. Namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya, terdapat penafsiran-penafsiran yang salah atau *"misleading"* terhadap nilai-nilai yang diajarkan, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, sehingga justru menciderai agama Islam itu sendiri. Yang paling nyata adalah bagaimana pemaknaan *"jihad"* yang membabi buta. Sebagai contoh, di Indonesia, sejarah mencatat telah terjadi sejumlah aksi bom bunuh diri, di antaranya

Bom Bali I pada tahun 2002, Bom Kuningan (Kedutaan Besar Australia) pada tahun 2004, Bom Bali II pada tahun 2005, dan dua kali Bom JW Marriot, masing-masing pada tahun 2003 dan 2009. Aksi-aksi tersebut dilakukan oleh pemuda-pemuda yang telah direkrut oleh kelompok-kelompok radikal untuk menjadi *"pengantin"*. Mereka sebenarnya telah diperdaya oleh pemaknaan-pemaknaan *"jihad"* yang keliru, sehingga mereka rela dalam rangka menghancurkan sasaran-sasaran yang dianggap sebagai musuh Islam. Ironisnya,

walaupun sebenarnya target utama dari rangkaian aksi bom bunuh diri seperti yang disebutkan di atas adalah warga negara asing dan simbol Barat yang ada di tanah air, namun pada kenyataannya, jauh lebih banyak warga negara Indonesia, beragama Islam, yang tidak berdosa, yang menjadi korban dari aksi-aksi keji tersebut. Tentu sebagai bangsa Indonesia, kita semua mengutuk berbagai aksi teroris yang terjadi di tanah air. Terorisme, apapun motifnya, merupakan aksi biadab yang dilakukan oleh pengecut. Selain korban jiwa, kerugian material, dan ketakutan yang timbul seketika terjadinya aksi terorisme, sebenarnya bangsa kita juga akan menderita kerugian jangka panjang. Yang jelas, peristiwa-peristiwa terorisme yang disebutkan di atas telah merusak citra bangsa Indonesia di dunia internasional. Bangsa kita dianggap sebagai bangsa yang tidak beradab. Negeri kita dianggap tidak aman, sehingga banyak negara sahabat yang akan segera mengeluarkan *"travel*

warning" untuk mencegah warga negaranya berpergian ke Indonesia. Sektor pariwisata kita sudah pasti akan terganggu. Paling tidak bisnis-bisnis di bidang transportasi, perhotelan, dan penyedia jasa lainnya, termasuk industri kreatif kita akan merugi. Kerugian yang diderita dapat mengakibatkan terjadinya pengurangan jumlah pegawai di sana-sini, yang berujung pada meningkatnya angka *"unemployment"* nasional. Di samping itu dengan dinyatakan sebagai negara yang tidak aman dan tidak stabil, maka akan menghambat masuknya investasi asing atau *"Foreign Direct Investment"* (FDI) ke Indonesia. Secara umum dampak yang ditimbulkan dari sebuah aksi teroris, walaupun dalam skala kecil, akan merugikan perekonomian negara kita.

Menyikapi ini semua, maka hal terbaik yang dapat dilakukan adalah selalu berpikir serta berupaya untuk mencegah jangan sampai aksi terorisme kembali terjadi di tanah air. Upaya preventif jauh lebih baik

dan lebih murah dibandingkan dengan upaya penanggulangan. Dan upaya preventif ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa. Tidak bijak jika kita menyerahkan tanggung jawab pencegahan dan penangkalan aksi-aksi terorisme sepenuhnya kepada Pemerintah, Polri dan TNI. Memang secara umum stabilitas keamanan negara merupakan tanggung jawab ketiga lembaga tersebut. Namun demikian jika kita menyadari betapa besarnya negara kita, baik ditinjau dari aspek geografi maupun demografi, belum lagi jika kita tambahkan variabel keanekaragaman SARA yang melekat pada diri bangsa kita, maka seharusnya kita memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap apa yang terjadi di sekitar kita.

Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita harus dapat memperkuat sistem deteksi dini dan cegah dini yang sudah berlaku dan akan terus dikembangkan. Ketika mengetahui

dan atau mencurigai seseorang atau sesuatu di sekitar kita, yang kita anggap tidak wajar, maka secara proaktif kita harus melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk segera diperiksa ataupun diaksi. Sebenarnya di tengah-tengah masyarakat kita sudah berlaku sistem deteksi dini dan cegah dini yang cukup efektif jika diaplikasikan dengan baik. Kita mengenal ada sistem lapor bagi pendatang baru di suatu komunitas tingkat terendah yaitu Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Sistem seperti ini sebenarnya diberlakukan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk kegiatan terorisme dan tindak kriminal, yang akan merugikan masyarakat.

Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal sederhana yang dapat dilakukan oleh *"civil society"* untuk mencegah berkembangnya paham-paham radikal yang melahirkan sel-sel teroris baru di tanah air.

Sebelumnya kita sudah membahas bahwa telah terjadi distorsi di tengah-tengah masyarakat kita terhadap nilai-nilai kebenaran agama. Lalu siapa yang bertanggung jawab untuk meluruskan ini semua? Kita harus menyadari bahwa pembentukan karakter dan penanaman moralitas yang baik dan benar bagi anak-anak dan generasi penerus kita merupakan tanggung jawab kita bersama. Pendidikan menjadi



Edukasi merupakan kunci pembentukan karakter

kata kunci di sini. Dan ketika kita berbicara tentang pendidikan, maka sesungguhnya tidak dibatasi oleh pendidikan-pendidikan yang sifatnya formal saja.

Memang sekolah merupakan wahana yang tepat untuk membangun karakter seorang anak. Melalui berbagai macam ilmu dan pengetahuan yang diberikan, seorang anak akan memperoleh nalar atau rasio untuk berpikir secara logis. Melalui seni dan budaya yang dikenalkan di sekolah, seorang anak juga akan memiliki cita rasa, yang akan menjadikannya peka dan humanis. Dan melalui pendidikan agama dan moral yang diberikan, seorang anak akan mendapatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Sang Maha Pencipta. Ketiga aspek tersebut sangatlah penting di dalam membentuk manusia-manusia yang cerdas, kreatif, bermoral dan berkepribadian baik. Namun perlu dipahami bahwa anak-anak kita tidak selama 24 jam setiap harinya berada di sekolah. Oleh karena itu peran orang tua di dalam membimbing dan membina anak-anaknya tetap tidak tergantikan.

Kita sering mengamati bahwa setelah anak-anak kita masuk usia wajib sekolah, peran orang tua dalam mengedukasi mereka seolah-olah menjadi nomor sekian. Tidak sedikit orang tua yang karena kesibukannya, akhirnya menyerahkan peran tersebut sepenuhnya kepada guru. Padahal guru juga memiliki keterbatasan untuk mengikuti perkembangan anak-anak didiknya satu persatu. Terlebih lagi, guru tidak dapat memantau apa yang dilakukan oleh anak-anak didiknya tersebut sepulang sekolah. Oleh karena itu, mari kita senantiasa membangun komunikasi yang baik di tengah-tengah keluarga dan lingkungan sekitar kita, sehingga kita dapat meyakinkan bahwa anak-anak kita, generasi penerus kita selanjutnya dapat tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang berkualitas, dan tidak salah arah. Selain keluarga, para tokoh agama juga memiliki peran yang besar dalam membentuk karakter masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran yang diajarkan oleh agama. Jika *"civil society"*

setiap saat dapat melakukan upaya-upaya di atas, Insya Allah bangsa kita akan menjadi bangsa yang unggul dan bermartabat, yang siap menyongsong peradaban yang maju atau *"advanced civilization"*. Mengungkap dan melumpuhkan jaringan teroris merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Pada bagian sebelumnya telah diilustrasikan, bahwa Amerika Serikat dengan kekuatan militer dan berbagai aset intelijen yang canggih sekalipun mengalami kesulitan. Dalam konteks ini, kelengkapan dan kecanggihan peralatan tempur semata menjadi tidak relevan. Dibutuhkan upaya lebih dari sekedar melengkapi satuan-satuan khusus anti teror yang kita miliki saat ini, baik di jajaran Polri maupun TNI, dengan



Latihan gabungan TNI - Polri dalam penanggulangan terorisme

sistem persenjataan, teknologi, termasuk aset-aset intelijen yang dibutuhkan. Upaya yang perlu diperkuat adalah mensinkronisasi *"efforts"* yang dilakukan oleh tiap-tiap bagian yang berkompeten dalam penanggulangan terorisme. Permasalahan yang kerap muncul adalah kurangnya koordinasi yang ketat antara satu dan lainnya. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Negara-negara yang sudah maju sekalipun sering menemui permasalahan yang serupa.

Yang paling sering terjadi adalah *"lack of coordination"* antara sesama komunitas intelijen, antar komunitas intelijen dengan satuan-satuan penindak khusus, atau *"special response units"*, maupun antara satuan-satuan penindak khusus itu sendiri, baik jajaran kepolisian maupun militer. Kelemahan dalam koordinasi ini biasanya lebih disebabkan oleh hambatan psikologis. Terdapat kecenderungan bahwa masing-masing lembaga intelijen memiliki keengganan untuk saling berbagi informasi, karena ada kekhawatiran bahwa informasi yang

di-*share* akan jatuh pada tangan yang salah. Hambatan komunikasi dan koordinasi seperti ini sangat mungkin menggagalkan suatu operasi. Memang benar bahwa operasi penanggulangan terorisme merupakan operasi khusus yang sangat membutuhkan kecerdasan, kesabaran dan kerahasiaan. Oleh karena itu wajar jika masing-masing bagian menjadi sangat tertutup. Namun demikian, jika skema *"sharing"* informasi dan aset yang dimiliki dapat dibangun dengan benar, maka operasi khusus tersebut dapat dilakukan secara lebih cepat, lebih efektif dan lebih *"decisive"*.

Dewasa ini kita sering mendengar diskusi yang sangat menarik tentang peran Polri dan TNI dalam menanggulangi terorisme di Indonesia. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah terkait dengan pembagian tugas dan tanggung jawab antara Polri dan TNI di dalam melaksanakan aksi di lapangan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 34 tentang TNI, dijelaskan bahwa salah satu tugas TNI dalam konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

adalah mengatasi aksi terorisme. Dengan demikian sebenarnya tidak boleh ada keragu-raguan bagi TNI untuk melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. TNI memiliki kemampuan untuk itu, oleh karenanya setiap saat harus siap terlibat dalam operasi penanggulangan terorisme, baik yang terjadi di darat, laut maupun udara.

Meskipun demikian kita harus memiliki pemahaman yang utuh dan kontekstual. Ketika terjadi aksi terorisme di tanah air yang mengganggu ketertiban

masyarakat, maka seyogyanya satuan anti teror Polri, dalam hal ini Densus 88, berperan sebagai *“first responder”*. Posisi satuan-satuan khusus anti teror TNI (Sat Gultor Kopassus TNI-AD, Pasukan Katak dan Denjaka TNI-AL, serta Den Bravo TNI-AU) tentu siap memberikan perkuatan, jika memang Densus 88 dan unit-unit Polri lainnya yang terlibat tidak dapat mengatasi situasi yang berkembang. Sama seperti yang berlaku di negara-negara lain. Sebagai contoh di Amerika Serikat, yang bertindak sebagai *“first responder”* adalah unit-unit khusus anti teror kepolisian



Personel Densus 88 melaksanakan latihan penanggulangan terorisme

masing-masing negara bagian yang dikenal dengan SWAT. Ketika mereka kewalahan dan membutuhkan perkuatan, maka satuan-satuan khusus anti teror (militer), seperti Delta Force dan Navy Seals akan segera dilibatkan. Demikian pula yang berlaku di Jerman, ketika ada ancaman maupun terjadi aksi teror di negara tersebut, maka yang pertama kali harus merespons adalah GSG-9, yang merupakan unit khusus anti teror kepolisian mereka. Jika diperlukan, maka pasukan khusus Angkatan Darat mereka yang bernama KSK, baru akan dilibatkan. Setelah memahami peran, fungsi dan tanggung jawab masing-masing, maka pada level taktis dan teknis satuan-satuan khusus anti teror di jajaran TNI maupun Polri harus dapat berkolaborasi dengan baik. Kolaborasi yang dimaksud adalah saling mengisi dan melengkapi dengan terlebih dahulu mengesampingkan egosentris masing-masing satuan. Hal ini dapat dicapai melalui penyelenggaraan

latihan-latihan gabungan TNI-Polri yang realistis, dengan mengangkat berbagai skenario terburuk yang mungkin akan dihadapi di masa yang akan datang. Dengan seringnya melakukan latihan gabungan seperti itu, maka diharapkan tingkat profesionalisme TNI-Polri di dalam mengatasi aksi terorisme semakin tinggi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah terbentuknya soliditas dan jiwa korsa antar satuan-satuan khusus TNI-Polri, yang merupakan modal penting dalam mencapai keberhasilan tugas.

TREN PERUBAHAN GEOPOLITIK DI ABAD 21: DUNIA SEMAKIN BERSIFAT “MULTIPOLAR”

Di abad 21, selain kita menyaksikan berkembangnya fenomena terorisme, perang asimetris antara *“state”* dan *“non-state actors”*, serta semakin meruncingnya pertentangan antara Dunia Barat dan Dunia Islam, tanpa disadari telah terjadi perkembangan

geopolitik baru yang penting untuk kita pahami. Di saat Amerika Serikat dan koalisinya disibukkan oleh perang di Afghanistan dan Iraq, telah muncul sejumlah negara sebagai kekuatan baru dunia. Yang paling mengemuka adalah keberhasilan China, India, Brazil dan Rusia menjadi “*economic powerhouse*”, tidak hanya pada lingkup regional tetapi juga global. Dengan kekuatan ekonomi yang mereka miliki saat ini, mereka dapat mempengaruhi politik internasional. Keempat negara tersebut, yang lebih dikenal sebagai *BRIC countries* (*Brazil, Russia, India and China*), jika digabungkan memiliki jumlah penduduk hampir 3 miliar atau sekitar 40% penduduk dunia, menguasai seperempat luas tanah dunia, serta memiliki GDP (*Purchasing Power Parity*)¹⁴ sebesar \$18.5 Triliun. Pada tahun 2010, Afrika Selatan bergabung dengan BRIC. Dengan penambahan anggota baru tersebut, terjadi sedikit

perubahan istilah BRIC menjadi BRICS (*Brazil, Russia, India, China and South Africa*).

Di lapis kedua terdapat sejumlah negara berkembang lainnya yang



Empat Pemimpin negara BRIC

juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat di abad 21. Mereka yang sering dijuluki sebagai “*the emerging economies*” tersebut, di antaranya adalah Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, dan Turki. Jim O’neil (Goldman Sachs) memberikan label MIKT. Keempat negara MIKT ini dianggap memiliki potensi yang luar biasa ditinjau dari sejumlah parameter pertumbuhan ekonomi. Mereka merupakan anggota G-20, bersama dengan BRICS dan sejumlah



Peta empat negara MIKT

negara maju. Di samping itu dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, bersama-sama BRICS, keempat negara tersebut juga diprediksi akan memimpin pertumbuhan ekonomi global. Oleh karena itu mereka juga sering disebut-sebut sebagai “*the EAGLE countries*” (*Emerging and Growth-Leading Economies*). Dengan semakin banyaknya kekuatan ekonomi baru yang muncul ke permukaan seperti yang diuraikan di atas, telah merubah “*balance of power*” dan juga konstelasi geopolitik, baik di kawasan maupun dunia. Negara-negara maju yang kita kenal selama ini tidak dapat lagi terlalu mendikte negara-negara lainnya, karena kekuatan dan pengaruh

di dunia telah terpolarisasi secara lebih meluas. Ini lah yang sering disebut dengan rezim “*multipolar*”. Mau tidak mau Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa Barat harus “mendengarkan” apa yang menjadi aspirasi dan kepentingan “*the emerging economies*” tersebut. Karena secara faktual, negara-negara maju kini memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh “*the emerging economies*”; tidak hanya dalam hal ekonomi (khususnya dalam konteks mengatasi krisis keuangan global), tapi juga dalam berbagai isu global lainnya seperti “*global warming and climate change*”, terorisme dan kejahatan transnasional.

¹⁴ Sumber merujuk pada Global Sherpa, Olga Slobodnikova dan Renata Nagyova dalam *Global Influence of the BRIC Countries*, dan Arne Melchior, NUPI dalam *BRICS and the Economic Decline of the Old World, 1990-2030*.

Sejak tahun 2008 kita menyaksikan kondisi ekonomi dunia yang tidak menggembirakan. Dalam dunia yang semakin terhubung, kegagalan sistem ekonomi atau suatu krisis di negara tertentu dapat dengan cepat, bagaikan “efek domino”, melanda negara-negara lainnya. Ini adalah fenomena yang sulit untuk dihindari. Ketika krisis melanda ekonomi terbesar dunia, Amerika Serikat, skema ekspor-impor antar negara pun sangat terpengaruh. Negara-negara Uni Eropa yang merupakan salah satu partner perdagangan terbesar Amerika Serikat menjadi korban yang paling mengkhawatirkan. Bahkan sejumlah negara di kawasan Eropa Barat tersebut, seperti Yunani dan Spanyol, mengalami kebangkrutan dimana rasio hutang terhadap GDP mereka mencapai angka-angka yang fenomenal.

Buruknya kondisi ekonomi ini, tentu menyulut terjadinya krisis sosial, yang juga berimplikasi pada situasi keamanan di kawasan.



Krisis Ekonomi di Yunani

Demonstrasi secara besar-besaran, yang tidak jarang bersifat anarkis, dilakukan dalam rangka menuntut pemerintahan negara masing-masing untuk segera mencari solusi dan mengakhiri krisis

Tingginya angka pengangguran atau “*unemployment*” menjadi faktor utama terjadinya gerakan sosial tersebut. Tidak hanya Eropa, negara-negara di Asia dengan tingkat kemapanan yang tinggi juga mengalami nasib yang serupa. Bahkan, China dan India yang menjadi pusat perhatian dunia selama hampir satu dekade terakhir atas tingginya angka pertumbuhan ekonomi mereka, juga mengalami

perlambatan yang cukup signifikan. Secara umum, resesi terjadi pada negara-negara dengan basis ekonomi ekspor.

Walaupun Indonesia juga turut terkena imbasnya, kita patut bersyukur karena ekonomi Indonesia tidak hanya memiliki ketahanan untuk dapat “*survive*” dari krisis keuangan global yang terjadi dewasa ini, tapi juga telah menunjukkan “*exceptional performance*” yang diapresiasi oleh dunia internasional. Dengan GDP *growth* sekitar 6.5% (*purchasing power parity*) di kuartal kedua 2012,

Indonesia tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan terbesar kedua di dunia setelah China¹⁵. Hal ini dimungkinkan oleh kebijakan yang tepat, dimana basis ekonomi dititikberatkan pada kombinasi antara tingginya volume investasi, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dan belanja pemerintah atau “*government spending*” yang cukup besar. Pemerintah telah jeli melihat kondisi demografi kita (nomor 4 terbesar di dunia) dan dengan semakin besarnya jumlah “*middle class*” atau “*consuming class*”, sebagai potensi



Suasana kerja di sebuah pabrik tekstil di Indonesia

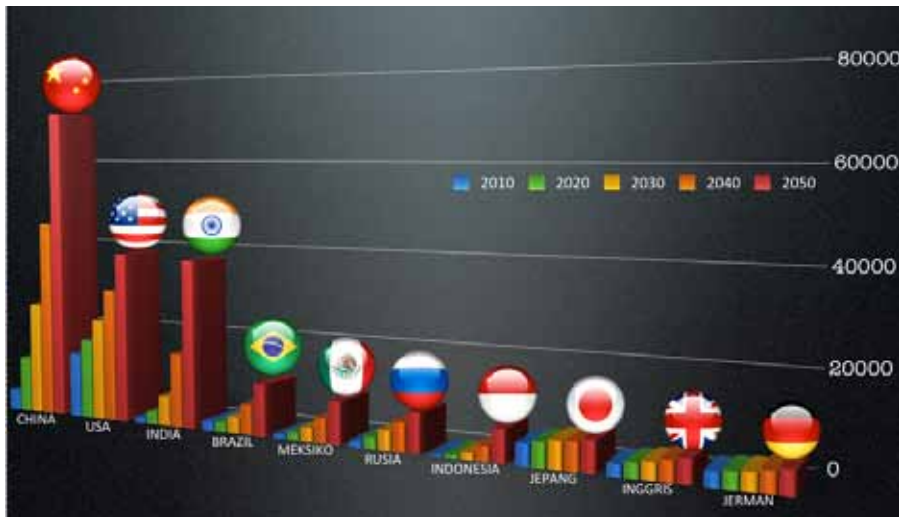
¹⁵ Sumber merujuk pada World Bank dan OECD.

pasar yang luar biasa.

Artinya walaupun volume ekspor kita cukup terganggu akibat lesunya pasar dunia, ekonomi kita masih dapat tumbuh baik dengan basis “domestic market” yang semakin dinamis tersebut.

Sejumlah proyeksi yang sangat positif terhadap ekonomi Indonesia dilakukan oleh berbagai lembaga internasional dewasa ini. Goldman Sachs memprediksikan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup konservatif di

sekitar angka 4.5%, maka Indonesia akan berada di posisi 7 besar dunia di tahun 2050, melewati Jepang, Inggris dan Jerman. Sedangkan McKinsey akhir tahun lalu me-release sebuah proyeksi yang lebih ambisius, dimana dengan pertumbuhan GDP di angka 6% per tahunnya, Indonesia pada tahun 2030 akan berada di posisi nomor 7 dunia. Di samping itu McKinsey juga memprediksi bahwa akan terjadi peningkatan jumlah “consuming class” di Indonesia, dari 45 juta (hari ini) menjadi 135 juta (tahun 2030); serta akan terjadi



Proyeksi ekonomi dunia tahun 2050 (sumber Goldman Sachs)



Proyeksi ekonomi Indonesia tahun 2030 (sumber McKinsey Global Institute)

kenaikan peluang pasar atau “market opportunity”, dari \$0.5 triliun menjadi \$1.8 triliun, khususnya di bidang jasa atau “consumer services”, pertanian dan perikanan, sumber daya alam utama, termasuk energi dan air, dan pendidikan.

Prediksi-prediksi yang begitu positif tersebut hendaknya tidak membuat kita berpuas diri. Justru sebaliknya, harus dijadikan sebagai pemacu agar kita bekerja lebih keras, sehingga dapat mengakselerasi proses pembangunan ekonomi menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan juga lebih merata bagi segenap bangsa Indonesia di

masa depan. Artinya angka-angka tersebut menjadi tidak berarti tanpa upaya-upaya terbaik yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa. Dalam perspektif militer, tentu pembangunan ekonomi sebuah negara hanya dimungkinkan jika negara tersebut berada dalam situasi yang aman dan kondisi yang stabil. Oleh karena itu, aspek pertahanan dan keamanan mutlak untuk dipenuhi sebagai prakondisi utama terselenggaranya pembangunan ekonomi.

PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NASIONAL DI ABAD 21



Prajurit TNI sedang melaksanakan latihan menembak mortir

Pertahanan dan keamanan nasional adalah milik bersama seluruh warga negara Indonesia. TNI tidak dapat berdiri sendiri untuk menjadi garda terdepan dan benteng terakhir NKRI. Diperlukan dukungan dari seluruh komponen bangsa untuk menjadikan TNI kita sebagai

“the real fighting force” yang siap mempertahankan setiap jengkal wilayah nusantara, serta menjaga integritas dan keutuhan bangsa. Sejarah panjang kita telah mencatat bahwa Indonesia berulang kali diuji oleh gangguan keamanan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, serta baik yang berskala nasional maupun lokal. Pemberontakan bersenjata yang dilancarkan oleh gerakan separatis dengan agenda pemisahan diri dari NKRI, khususnya di Aceh dan Papua menjadi fokus utama TNI selama ini.

Kita bersyukur bahwa dengan kerja keras TNI untuk menumpas gerakan separatis di Aceh melalui operasi militer, baik dalam bentuk operasi pertempuran lawan insurjensi maupun operasi teritorial, selama kurang lebih 3 dekade yang lalu pada akhirnya berbuah manis. Namun tentu kita harus berbesar hati untuk mengakui bahwa selama itu pula terdapat berbagai kekurangan yang dilakukan oleh prajurit-prajurit kita di lapangan, yang terkadang justru

kontraproduktif terhadap upaya besar menumpas gerakan separatis itu sendiri. Yang paling menonjol adalah terjadinya kekerasan yang berlebihan atau membabi buta di dalam mencari dan melumpuhkan separatis. Memang benar adanya bahwa dalam setiap pertempuran berlaku prinsip-prinsip seperti *“survival of the fittest”* dan *“kill or to be killed”*. Setiap prajurit setelah memahami benar tugas pokoknya tentu ingin berhasil dan selamat di medan pertempuran. Setiap prajurit termotivasi ingin menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, dan kembali ke keluarganya utuh tanpa kurang satu apapun. Oleh karena itu wajar jika dalam suasana pertempuran di Aceh ketika itu, mereka sangat ingin terlibat dalam kontak tembak yang heroik untuk menghancurkan kekuatan musuh.

Namun ternyata layaknya operasi lawan insurjensi dimanapun di dunia, segala sesuatunya tidak sederhana dan penuh dengan tantangan. Tantangan yang

pertama, kita tidak pernah mengetahui secara pasti kedudukan musuh, terlebih jika musuh berbaur dan bahkan menjadikan penduduk sipil sebagai tameng hidup. Yang kedua, insurjen secara umum lebih menguasai medan dan ruang pertempuran, sehingga memiliki keunggulan secara taktis dibandingkan dengan pasukan TNI. Dengan demikian tentu sulit bagi satuan-satuan TNI untuk mencari dan melumpuhkan separatis. Menghadapi tantangan seperti ini seringkali timbul rasa jenuh dan bahkan frustrasi, dimana jika tidak dapat dikendalikan akan berpotensi menjadi tindakan-tindakan yang melebihi batas kewajaran. Akhirnya terjadi *“collateral damage”* yang tidak diinginkan, termasuk jatuhnya korban di pihak sipil. Ini lah yang dikatakan sebagai kontraproduktif tadi. Ketika kita salah dalam mengidentifikasi dan atau melumpuhkan sasaran, maka yang paling mungkin terjadi adalah menciptakan musuh-musuh baru. Padahal kita semua memahami

bahwa salah satu faktor kritis untuk dapat memenangkan operasi lawan insurjensi adalah dengan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat di daerah operasi. Oleh karena itu setiap saat disuarakan dengan lantang pentingnya upaya memenangkan hati dan pikiran rakyat, atau *"winning the hearts and minds of the people"*.

Pemerintah akhirnya dengan cermat menyusun strategi yang jauh lebih komprehensif. Hal ini dilakukan setelah menyadari bahwa pendekatan keamanan saja (seperti yang dilakukan oleh TNI dan Polri sebelumnya) tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan di Aceh. Dibutuhkan keterlibatan yang lebih luas dari elemen-elemen lainnya, melalui pendekatan ekonomi, pendekatan kesejahteraan, pendekatan politik, pendekatan hukum, termasuk pendekatan agama dan budaya. Kesemua ini memperkuat pendekatan keamanan yang telah lebih dulu dilakukan di daerah konflik. Yang menjadi kunci di sini adalah sinergi dan kolaborasi yang baik dan terukur antar seluruh

komponen yang terlibat. Masing-masing harus dapat melengkapi dan mendukung upaya lainnya. Ditambah dengan faktor tsunami yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2005 (ditandai dengan *Helsinki Agreement*) resolusi penyelesaian Aceh secara damai dapat tercapai.

Pelajaran berharga yang dapat diambil dari pencapaian sejarah tersebut adalah bahwa dalam menyusun sebuah strategi kita harus dapat memahami dan membedakan mana yang dikatakan sebagai *"means"*, *"ways"*, dan *"ends"*. Dalam konteks penyelesaian masalah Aceh, terkadang kita keliru untuk menempatkan TNI dengan operasi militer nya sebagai tujuan akhir atau *"ends"*. Jika ini yang terjadi maka kita tidak akan pernah menerima ada opsi-opsi lain selain operasi militer dalam rangka penyelesaian Aceh. Namun kalau kita menetapkan bahwa tujuan akhir atau *"ends"* dari strategi besar yang dibuat adalah "Aceh yang aman dan damai dalam kerangka NKRI", maka kita



Helsinki Agreement pada tanggal 15 Agustus 2005 sebagai tonggak perdamaian di Aceh

seharusnya dapat mengeksplorasi dan mempertimbangkan lebih jauh opsi-opsi lainnya. Artinya negara, dalam hal ini pemerintah pusat, dapat mengerahkan berbagai alat atau *"means"* lainnya untuk mendukung TNI di Aceh; serta dapat mengembangkan cara-cara atau *"ways"* lainnya untuk menopang operasi militer yang telah dilakukan sebelumnya di propinsi tersebut, termasuk melalui berbagai upaya negosiasi dan diplomasi strategis

dengan berbagai pihak penting. Sekali lagi kita patut bersyukur karena sejak perjanjian damai tahun 2005 tersebut, kita dapat menyaksikan wajah Aceh yang sungguh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang penuh dengan darah dan air mata. Saat ini rakyat Aceh dapat hidup dengan tenang dan damai. Meskipun demikian kita tidak boleh melihat sesuatunya akan

berjalan secara sempurna sesuai dengan yang kita harapkan. Kita harus realistis mengatakan bahwa *"Peace and security in Aceh should not be taken for granted"*. Terutama bagi kita yang berprofesi sebagai prajurit TNI, kita harus setiap saat memonitor perkembangan di lapangan, serta menyusun rencana kontinjensi dan menyiapkan kekuatan secara terukur dalam rangka mengantisipasi terjadinya *"breakdown"* dari implementasi perjanjian damai, terlebih jika kembali terjadi gangguan keamanan di Aceh. Pendek kata, TNI setiap saat harus siap untuk dilibatkan dalam skenario-skenario terburuk yang mungkin terjadi di masa depan. Di dalam menyelesaikan permasalahan internalnya, bangsa Indonesia memiliki sikap yang tegas bahwa tidak akan pernah mau didikte atau ditunggangi oleh kepentingan pihak asing manapun. Hal ini juga berlaku ketika menghadapi situasi keamanan yang masih *"ups-and-downs"* di Papua. Kita mengamati

bahwa selama ini ada sejumlah pihak asing yang berupaya untuk mendukung kemerdekaan Papua sebagai negara berdaulat. Dalam upaya diplomasi kita di luar, baik di PBB maupun secara bilateral dengan negara-negara sahabat, Indonesia menegaskan bahwa sama halnya dengan Aceh, Papua merupakan bagian integral NKRI. Ini adalah final atau harga mati. Kalaupun sampai dengan hari ini masih tersisa gerakan maupun organisasi yang menginginkan pemisahan diri dari NKRI, maka itu adalah tanggung jawab Indonesia untuk menyelesaikannya. Namun harus terus ditegaskan bahwa isu ini bukanlah sesuatu untuk dibawa ke forum internasional, yang kemudian dibuka opsi untuk dilakukannya referendum atau jajak pendapat ala Timor Timur yang lalu. Secara historis Papua tidak sama dengan Timor Timur. Oleh karena itu terhadap gangguan keamanan yang terjadi akhir-akhir ini di Papua, kita semua harus dapat mengambil langkah-langkah secara tepat dan

terukur untuk segera menghentikan kekerasan dan timbulnya lebih banyak korban baik di pihak TNI, Polri, maupun masyarakat setempat yang tidak mendukung agenda pemisahan diri Papua. Satuan-satuan TNI yang tergelar di Papua termasuk yang melaksanakan operasi militer di wilayah tersebut harus semakin meningkatkan kewaspadaannya serta lebih fokus pada pelaksanaan operasi lawan insurjensi secara efektif di lapangan dalam rangka melumpuhkan gerakan separatis bersenjata. Komunitas intelijen yang ditugaskan di propinsi



Prajurit TNI melaksanakan patroli keamanan

tersebut juga harus semakin meningkatkan *"performance"* nya untuk mendapatkan informasi-informasi yang aktual, untuk selanjutnya diolah dan diseminasi secara cepat bagi kepentingan

operasional satuan-satuan tempur maupun teritorial di lapangan. Kolaborasi antar elemen pada tataran strategis dan operasional juga sangat diperlukan mengingat kompleksitas permasalahan lokal yang mendominasi selama ini. Di samping tantangan keamanan yang bersifat vertikal seperti di Aceh dan Papua tersebut, persatuan dan kesatuan bangsa kita juga tidak jarang diuji oleh beragam konflik horizontal yang terjadi di berbagai wilayah tanah air. Memang, mengingat tingkat kemajemukan yang begitu tinggi, dimana bangsa Indonesia terdiri ratusan etnis dengan karakter, budaya dan bahasanya sendiri-sendiri, Indonesia sering diprediksi bahwa akan mengalami nasib yang sama dengan negara-negara Balkan pasca Perang Dingin. Satu-persatu lepas dan merdeka sebagai negara yang berdaulat. Tapi Alhamdulillah, ternyata itu tidak terjadi pada bangsa kita. Pancasila dengan *"Bhinneka Tunggal Ika"* nya tetap menjadi pemersatu yang kokoh. Meskipun demikian, seperti



Konflik horizontal di Ambon

yang sama-sama kita ketahui, bangsa Indonesia tidak luput dari benturan-benturan berbasiskan SARA. Terdapat sejumlah tragedi yang menyisakan kepedihan sampai dengan hari ini, seperti di Poso, Sampit, Ambon, dan beberapa daerah lainnya. Lagi-lagi ketika itu semua terjadi maka TNI dan Polri lah yang paling dulu dikerahkan untuk menghentikan serta mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak lagi di daerah konflik. Tetapi dalam kerangka yang lebih besar sesungguhnya pertentangan pendapat termasuk gesekan secara fisik antar suku maupun agama semacam ini dapat kita cegah

bersama-sama. Upaya pencegahan ini melibatkan semua pihak, bukan hanya Pemerintah, TNI ataupun Polri. Di sini peran *"civil society"* menjadi sangat mengemuka. Dialog antar pemeluk agama, atau sering disebut sebagai *"inter-faith dialog"* harus terus digelorakan sehingga akan terbangun sebuah toleransi antar umat beragama yang tidak semu. Sama halnya dengan upaya mencegah terjadinya "perang saudara" antara dua suku yang berbeda, kita harus membuka lebih banyak peluang komunikasi yang konstruktif antar komunitas, suku, dan daerah, sehingga dapat lebih saling memahami karakter,

nilai dan budaya masing-masing. Dengan demikian akan terbentuk sikap yang saling menghormati dan menghargai. Pada akhirnya toleransi tersebut menjadi kunci bagi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Baik dalam skenario konflik vertikal maupun horizontal seperti yang diuraikan di atas, ternyata keberadaan dan peran TNI sangat dominan. Memahami realitas ini, maka TNI harus setiap saat berbenah diri dan meningkatkan kapasitasnya sehingga sampai kapanpun tetap relevan dalam sebuah konstruksi besar penyelesaian permasalahan bangsa. Apa yang dilakukan TNI saat ini tentu sangat menentukan masa depan pertahanan negara dan keamanan nasional kita. Penataan terhadap doktrin untuk dapat menjawab ancaman dan tantangan terkini, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, serta perluasan ragam penugasan manca negara, khususnya *"peacekeeping"*, saat ini dilakukan secara sistematis dalam rangka memperkuat profesionalisme seluruh prajurit.

Di samping itu TNI juga tengah memodernisasi organisasi dan sistem persenjataannya, yang semata-mata ditujukan untuk mengejar ketertinggalannya selama ini dalam pemenuhan postur kekuatan yang diperlukan dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI, atau sering disebut sebagai *"Minimum Essential Force"* (MEF).

Walaupun dalam prediksi jangka pendek dan menengah Indonesia tidak memiliki ancaman aktual dari militer asing, kita tidak boleh beranggapan bahwa kita akan selamanya berada pada masa damai. Terlebih jika kita memahami benar bahwa abad 21 ini penuh dengan ketidakpastian. Apa yang dewasa ini melanda sejumlah negara di kawasan Afrika Utara, seperti Tunisia, Mesir dan Libya, serta Timur Tengah, seperti Yemen dan Syria, sangat menarik untuk kita amati bersama. Diawali oleh krisis politik yang berpadu dengan krisis ekonomi, telah melahirkan krisis keamanan yang berkepanjangan

dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materi yang tak ternilai harganya. Sebenarnya walaupun dalam skala yang jauh lebih kecil dan dalam konteks yang tidak sama persis, bangsa Indonesia pernah mengalami masa-masa suram seperti itu. Krisis moneter dan krisis politik di tahun 1997-1998 yang lalu telah melahirkan gelombang reformasi nasional. Demokrasi menjadi basis perjuangan para reformis di tanah air saat itu. Sejak saat itu Indonesia telah membuka lembaran sejarah baru yang terus bergulir sampai hari ini, dimana kita saat ini menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat.

Dan gelombang yang serupa kini terjadi di dua kawasan tadi. Namun yang penting untuk kita jadikan pelajaran adalah bahwa apa yang terjadi (khususnya di Syria) dewasa ini ternyata tidak semata-mata permasalahan internal bangsa mereka. Syria telah menjadi “battleground” dari “external powers”

yang memiliki kepentingan-kepentingan strategis di negara tersebut. Bisa dikatakan selain “civil war”, telah terjadi pula “proxy war” di Syria, dimana kekuatan asing sesuai dengan kepentingannya masing-masing, memberikan dukungan kepada pemerintah yang berkuasa atau faksi-faksi yang terlibat dalam perlawanan, baik berupa intelijen, diplomatik, maupun logistik. Dengan demikian situasi politik dan keamanan menjadi semakin kompleks dan dapat dipastikan krisis akan semakin berlarut. Terhadap situasi yang berkembang ini, Indonesia menegaskan sikapnya di berbagai forum internasional dengan menghimbau kepada PBB dan negara-negara yang paling berpengaruh dan atau paling berkepentingan terhadap apa



Krisis Keamanan di Syria

yang terjadi di Syria untuk segera mengambil aksi dalam rangka menghentikan kekerasan serta mencegah jatuhnya lebih banyak korban yang tak berdosa. Apa yang kita saksikan di Syria ini patut kita jadikan pelajaran, bahwa bisa saja di masa depan “proxy war” terjadi di negara kita, dimana ada dua atau lebih kekuatan asing yang memiliki kepentingan atas Indonesia, apapun bentuknya.

SPEKTRUM PENUGASAN TNI DAN PENTINGNYA MEMPERKUAT ASPEK “HARD POWER”

Oleh karena itu selain tetap memfokuskan dirinya sebagai penjaga stabilitas keamanan nasional dari berbagai bentuk gangguan internal termasuk di dalamnya adalah insurjensi dan terorisme, TNI sebagai kekuatan pertahanan negara harus memiliki kekuatan yang dapat menangkal berbagai format ancaman dari luar. Inilah hakikat dari “hard power” yang sampai kapanpun relevan dan dibutuhkan dalam konteks

pertahanan negara. Memang sering kita mendengar bahwa sebuah militer dinyatakan hebat bukan karena kecanggihan senjatanya, tetapi karena keterampilan dan daya juang prajurit-prajuritnya. Pernyataan ini tidak keliru. Namun kenapa kita tidak memilih untuk memiliki kedua-duanya, yaitu: persenjataan yang canggih yang diawaki oleh prajurit-prajurit yang handal dan profesional? Terlebih di zaman yang semakin modern ini, negara-negara di dunia berupaya untuk menginkorporasi segala teknologi yang berkembang saat ini dalam industri pertahanan strategis untuk menghasilkan sistem persenjataan militer yang super canggih. Memang ada kekhawatiran bahwa pesatnya kemajuan teknologi di abad 21 ini akan memicu timbulnya kembali perlombaan bersenjata antar negara-negara di dunia.

Bagi Indonesia, dan khususnya TNI, memodernisasi alutsista yang kita miliki saat ini merupakan sesuatu yang mutlak untuk

dilakukan. Kita tentu tidak ingin terjebak dalam situasi perlombaan bersenjata tersebut, tapi kita juga harus memiliki kalkulasi tersendiri terhadap ancaman apa yang mungkin dihadapi oleh Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Pasca krisis 1997-1998 modernisasi alutsista TNI dapat dikatakan tidak menjadi perhatian, karena memang negara ketika itu belum memiliki kemampuan anggaran untuk mendukungnya. Kondisi ini diperburuk dengan sanksi yang diterima Indonesia, termasuk embargo senjata yang diberlakukan oleh negara-negara produsen utama, termasuk Amerika Serikat dan Eropa Barat. Konsekuensi dari ini semua adalah tidak hanya TNI tidak mampu membeli persenjataan baru, tapi juga telah mengakibatkan terjadinya penurunan kemampuan alutsista TNI karena sulitnya mendapatkan suku cadang yang diperlukan. Dan kini setelah situasi dalam negeri semakin membaik, dimana Aceh tidak lagi membara, embargo militer terhadap Indonesia

dicabut pada tahun 2005, serta terlebih ekonomi kita yang semakin menguat dari tahun ke tahun, memberikan peluang kepada negara untuk mengalokasikan porsi yang lebih besar bagi anggaran pertahanan atau *"defense budget"* dan belanja militer atau *"military spending"*. Bahkan dalam pidato kenegaraan tentang RAPBN tahun 2013 yang disampaikan oleh Presiden Yudhoyono pada tanggal 16 Agustus 2012 yang lalu dijelaskan bahwa Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran terbesar yaitu Rp77,7 triliun. Angka ini menunjukkan keseriusan pemerintah di dalam meng-upgrade aspek *"hard power"*, di samping meningkatkan kesejahteraan prajurit. Setelah mengetahui terjadinya peningkatan anggaran pertahanan secara signifikan tersebut, maka Kementerian Pertahanan bersama-sama TNI harus dapat menyusun berbagai prioritas sehingga penyerapan terhadap anggaran tersebut benar-benar tepat guna dan tepat sasaran.

Tidak dapat dipungkiri bahwa ada sejumlah pihak yang mempertanyakan, "Mengapa Kementerian Pertahanan memperoleh alokasi anggaran yang begitu besar mengingat saat ini kita tidak dalam masa perang?" Memang logika awam akan berpendapat seperti itu. Tapi yang sering dilupakan adalah militer di negara manapun sejatinya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mengancam negaranya. Artinya militer setiap saat harus mempersiapkan diri untuk sewaktu-waktu dilibatkan dalam pertempuran atau peperangan. Oleh karena itu waktu yang paling tepat untuk mempersiapkan diri tersebut adalah ketika masa damai. Persiapan diri itu termasuk dengan penyiapan personel, alutsista dan logistik pendukung lainnya. Di samping alasan ini, yang sering dilupakan adalah bahwa militer tidak hanya dikerahkan untuk melawan militer asing. Sesuai dengan UU No. 34 tahun 2004

tentang TNI, tugas TNI selain melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP) adalah melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk di dalamnya adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan memberikan kemanusiaan; membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan atau *"search and rescue"*; membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan; serta melaksanakan tugas perdamaian dunia.

Jika melihat spektrum penugasan TNI yang begitu luas, maka sebenarnya sangat wajar jika TNI mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar untuk dapat melengkapi dirinya, sehingga memiliki kesiapan operasional yang dibutuhkan setiap saat dalam berbagai kontinjensi. Letak negara kita yang berada di antara tiga lempeng utama dunia yaitu



Prajurit TNI dalam operasi penanggulangan bencana alam

lempeng Australia, lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik, serta berada di posisi *"ring of fire"* menjadikannya sangat rentan terhadap bencana alam, khususnya gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Belum lagi kerusakan lingkungan yang juga berpotensi mengakibatkan terjadinya bencana alam sebagai dampak dari fenomena *"global warming"* dan *"climate change"* yang melanda dunia dewasa ini. Pengalaman TNI dalam penanggulangan akibat

tsunami di Aceh dan Nias tahun 2004, gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006, letusan Gunung Merapi tahun 2010, dan masih banyak lagi bencana alam lainnya di tanah air, seharusnya dapat dijadikan referensi bagi Kementerian Pertahanan untuk melengkapi TNI dengan berbagai peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam rangka menyelamatkan korban bencana alam, serta membantu pemerintah setempat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Sama halnya dalam membantu proses *"search and rescue"* terhadap korban kecelakaan, TNI harus dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Yang mungkin tidak diprediksi sebelumnya adalah bagaimana TNI harus mampu dikerahkan secara cepat untuk menyelamatkan WNI yang berada jauh dari tanah air. Pada tanggal 16 Maret 2011, KMV Sinar Kudus, sebuah kapal berbendera Indonesia yang diawaki oleh 20 orang ABK, dibajak oleh 35 orang perompak Somalia di Teluk Aden.

Mereka meminta Rp27 miliar sebagai tebusan. Segera setelah mengetahui situasi ini Presiden Yudhoyono sebagai Panglima Tertinggi mengambil keputusan untuk mengirim Satgas Merah Putih untuk membebaskan KMV Sinar Kudus dan menyelamatkan seluruh ABK yang berada di dalamnya. Dalam situasi yang serba tidak jelas, karena memang intelijen yang didapatkan sangat terbatas, Satgas Merah Putih dengan menggunakan tiga kapal perang yaitu KRI Yos Sudarso, KRI Abdul Halim Perdanakusuma, KRI Banjarmasin bergerak menuju Teluk Aden. Di samping itu Satgas juga membawa



Satgas Merah Putih melaksanakan operasi pembebasan sandera di perairan Somalia

satu “Heli Bolco 105”, dan enam “Sea Rider”. Operasi pembebasan sandera semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Karena untuk pertama kalinya TNI melaksanakan “*long-range force projection*” ke sebuah lokasi berjarak kurang lebih 7.000 mil dari Indonesia. Jarak ini bahkan lebih jauh dibandingkan ketika pada tahun 1982 militer Inggris mengerahkan “*Expeditionary Force*” nya untuk mengambil kembali Kepulauan Malvinas yang telah diduduki militer Argentina. Dengan bekal latihan dan pengalaman yang dimiliki selama ini, akhirnya personel Satgas Merah Putih dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Drama pembebasan sandera berakhir manis dimana perompak dapat dilumpuhkan, seluruh ABK dapat dibebaskan dan kembali ke tanah air dengan selamat. Keberhasilan operasi ini merupakan pencapaian yang perlu diapresiasi oleh kita semua. Tetapi dari uraian di atas, ada satu hal yang penting untuk dipelajari bersama yaitu untuk mengerahkan pasukan dalam jarak yang jauh membutuhkan kesiapan

operasional alutsista yang prima. Misi akan gagal jika misalnya terjadi kerusakan alutsista di perjalanan ataupun pada saat melaksanakan aksi di sasaran. Oleh karena itu tidak ada pilihan kecuali alutsista TNI setiap saat “*ready for deployment*”. Dalam konteks yang berbeda, Indonesia sejak tahun 1957 telah mengirimkan pasukan Garuda nya ke berbagai misi perdamaian dunia. Partisipasi secara aktif dalam mewujudkan dan menjaga “*international peace and security*” ini memang merupakan komitmen bangsa kita yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu TNI memiliki peran yang sangat besar untuk mengimplementasikan amanah konstitusi tersebut secara riil di lapangan. Dan untuk dapat berkontribusi dalam pasukan perdamaian PBB, TNI harus dapat memenuhi sejumlah standar tertentu (yang juga berlaku bagi seluruh negara kontributor pasukan, atau “*troops contributing countries*”) terkait dengan alutsista yang digunakan selama menjalankan misi. Oleh karena itu untuk menjamin

kesuksesan dalam melaksanakan tugas-tugas operasional, serta yang lebih penting lagi adalah demi nama baik bangsa Indonesia di mata internasional, TNI harus benar-benar menyiapkan pasukan Garuda yang akan diberangkatkan secara optimal. Selain menjalankan amanah konstitusi, sebenarnya pengiriman pasukan perdamaian ke berbagai daerah konflik di dunia merupakan bentuk paling nyata dari kebijakan politik luar negeri kita yaitu: “Bebas dan Aktif”, yang diperkuat dengan prinsip-prinsip “*All directions*” dan “*A million of friends*

and zero enemy”. Dengan alasan ini sebenarnya kita dapat mematahkan pendapat skeptis yang dilontarkan oleh sejumlah pihak yang mempertanyakan, “apa kepentingan Indonesia dalam mengirimkan pasukan perdamaian di saat masih terdapat permasalahan keamanan di dalam negeri?”

Yang perlu kita suarkan bersama adalah bahwa modernisasi TNI merupakan sesuatu yang mutlak untuk dilakukan secara seksama. Dan upaya ini tidak mungkin dilakukan oleh TNI secara berdiri



Kesiapan operasional Pasukan Garuda di Lebanon

sendiri. TNI membutuhkan “support” dari berbagai komponen bangsa lainnya. TNI sangat membutuhkan dukungan politik, finansial, dan moril untuk dapat melanjutkan modernisasi yang tengah bergulir saat ini.

REVOLUSI DI BIDANG ICT DAN GLOBALISASI : PELUANG DAN TANTANGAN ABAD 21

Pada kesempatan yang baik ini, mari kita kembali sama-sama mencermati perkembangan situasi dunia dewasa ini yang sangat dinamis, serta memahami berbagai peluang yang perlu kita rebut dan sejumlah tantangan yang harus kita antisipasi. Revolusi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, atau *information and communications technology* (ICT) telah menjadikan dunia kita semakin “flat” dan terhubung. Kita merasakan bahwa saat ini hampir tidak ada “barrier” yang dapat memisahkan masyarakat dunia. Fenomena ini tentu tidak terbayangkan oleh generasi-generasi sebelumnya. Di

era terdahulu, sebuah informasi khususnya yang berklasifikasi rahasia atau “*confidential*” memiliki nilai yang sangat mahal. Dan biasanya hanya dimiliki oleh negara. Sangat wajar karena memang di masa itu hanya negara yang memiliki teknologi, aset atau perangkat yang diperlukan untuk memperoleh informasi secara cepat dan aktual. Namun dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat di abad 21 ini, telah menggeser paradigma tersebut. Setiap organisasi, bahkan setiap orang saat ini dapat dengan mudah memiliki perangkat komunikasi yang beredar di pasar.

Berbagai jenis telepon seluler dari harga ratusan ribu sampai dengan jutaan rupiah, atau puluhan sampai ratusan dollar, dapat dibeli oleh masyarakat dewasa ini. Yang jelas perangkat komunikasi yang semakin “cerdas” ini tidak hanya memungkinkan penggunaannya untuk setiap saat berinteraksi dengan lawan bicaranya, tapi juga dapat dengan cepat menyebar



Sebuah ilustrasi bahwa dengan ICT dunia semakin terhubung

informasi tanpa batas. Apalagi dengan semakin dalamnya penetrasi internet di masyarakat dunia, termasuk Indonesia, telah melahirkan jutaan komunitas di dunia maya yang memiliki pengaruh cukup (bahkan terkadang sangat) besar terhadap apa yang terjadi di dunia sebenarnya. Sebagai ilustrasi sederhana, sebelum era ICT, tidak terbayangkan seseorang yang berdomisili di Jakarta untuk dapat mengetahui suatu peristiwa tertentu yang terjadi di Bandung

secara “*real time*”. Namun saat ini jangankan hanya berbeda kota, seseorang dapat menyebar sebuah informasi atau menyiarkan sebuah peristiwa secara langsung (tanpa tunda) ke seluruh belahan dunia hanya dari genggamannya. Dengan sebuah perangkat “*smart phone*” atau “*smart tablet*”, seorang siswa sekolah dasar dapat mendokumentasikan sebuah peristiwa yang terjadi di sekelilingnya, kemudian meng-*upload*-nya di internet apakah

melalui google, yahoo, youtube, maupun “*search engine*” lainnya; termasuk melalui berbagai jenis jejaring sosial populer seperti twitter dan facebook. Dan dengan segera seseorang yang berada puluhan ribu kilometer atau berbeda belasan zona waktu (*time zone*) dari siswa tersebut dapat turut mengetahui dan menyaksikan peristiwa yang terjadi.

Penggalan contoh di atas dapat menggambarkan bahwa kini semua orang dapat terhubung, atau “*everyone is interconnected*”. Di samping itu, informasi menjadi sangat murah, dan yang jelas sangat sulit untuk dapat didominasi apalagi dimonopoli oleh negara. Hampir tidak mungkin bagi suatu rezim tertentu untuk membatasi apalagi menghentikan laju arus informasi dan komunikasi antar manusia tersebut. Ini lah kekuatan ICT, dan kekuatan ICT ini suka tidak suka merupakan keniscayaan abad 21. ICT telah merubah wajah dunia kita secara begitu fenomenal. Saat ini dunia seolah bergerak

jauh lebih cepat, dimana manusia seolah hidup lebih dekat satu sama lainnya. Begitu banyak peluang dan manfaat yang ditawarkan oleh ICT, sehingga memungkinkan terjadinya percepatan yang luar biasa dalam kemajuan peradaban manusia.

Namun demikian ICT juga bagaikan dua mata pedang. Jika kita dapat memanfaatkan ICT seluas-luasnya secara positif dan ditujukan hanya untuk kebaikan, maka tentu akan terjadi loncatan-loncatan dalam sejarah yang akan membawa umat manusia ke peradaban yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika ICT digunakan dalam konteks yang negatif dan destruktif, maka dapat secara langsung maupun tidak langsung menghadirkan berbagai macam permasalahan, dan bahkan kehancuran bagi kehidupan manusia. Sebagai contoh, ICT dapat digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh sejumlah aktor, kelompok, atau organisasi untuk melakukan tindak kriminal, atau kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk

berbagai aksi terorisme yang menggelora di awal abad 21 ini. Dengan memanfaatkan internet, sebuah jaringan teroris dapat menebar gagasan atau pesan-pesan yang radikal dan provokatif tentang isu tertentu dengan harapan apapun agenda, tujuan dan aksi mereka akan mendapat simpati dan dukungan dari publik. Selain itu melalui jejaring sosial mereka dapat memperdaya mereka yang dapat dikatakan “*innocent*” untuk kemudian direkrut untuk menjadi bagian dari jaringan teroris tersebut. Pada umumnya metode yang digunakan adalah dengan menyentuh sentimen etnis atau agama tertentu. Dalam hal ini, kelompok radikal yang berbasiskan agama biasanya tidak ragu-ragu untuk mengutip ayat-ayat suci tertentu dengan pemaknaan yang salah. Dan lebih jauh lagi mereka dapat menyebar berbagai informasi terkait dengan “*know how*” mengenai teknis membuat “senjata” yang dapat mereka gunakan dalam rangka melancarkan aksi mereka.

Yang paling sering ditemui di dunia maya adalah informasi tentang cara merakit bom, termasuk bom bunuh diri. Dengan dihidirkannya berbagai ilustrasi terkait dengan material yang diperlukan serta cara merakit bom yang dapat dilakukan secara sederhana, diharapkan dapat lebih menarik minat mereka yang telah direkrut sebelumnya.

Sekali lagi kehadiran ICT di tengah-tengah masyarakat dunia dewasa ini sesungguhnya telah membawa peluang dan tantangannya tersendiri. Dengan ICT kehidupan dan aktivitas manusia sehari-hari menjadi semakin mudah. Hampir semua hal dapat dilakukan secara “*online*”. Bisnis dan berbagai transaksi keuangan dapat dilakukan secara *online*. Seorang mahasiswa tidak harus beranjak dari rumahnya untuk mengikuti perkuliahan karena dapat dilakukan secara *online*. Seorang komandan militer tidak harus setiap saat melakukan inspeksi secara fisik ke lapangan termasuk untuk memberikan dukungan moril

kepada komandan bawahan beserta pasukannya, karena sesungguhnya ia dapat melakukan *"Commander's Call"* secara *online*. Dan masih banyak lagi aspek-aspek kehidupan kita yang telah dan akan semakin dipermudah oleh berbagai fasilitas ICT yang semakin hari menjadi semakin canggih, namun juga semakin terjangkau atau *"affordable"*.

Di sisi lain, ternyata dengan semakin bergantungnya manusia terhadap ICT, maka sebenarnya semakin tinggi pula tingkat kerentanan atau *"vulnerability"* dalam kehidupan manusia sehari-hari. Selain dapat dimanfaatkan secara negatif oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengganggu atau *"disrupting"* sendi-sendi kehidupan



Cyber Warfare semakin mengemuka di abad 21

bermasyarakat, di abad 21 ini sistem ICT juga dijadikan sebagai target utama dalam perang modern. Kita telah mengenal *"Cyber Warfare"* yang merupakan bagian dari *"Information Warfare"*. Dalam konteks perang ini, dua atau lebih negara berupaya untuk saling mendobrak atau melakukan penetrasi terhadap jaringan komputer serta sistem ICT lainnya dalam rangka mencuri informasi atau data-data strategis, dan atau mengganggu dan atau melumpuhkan sistem tertentu. Artinya jika terjadi *"disruption"* terhadap sistem ICT kita maka akan menimbulkan kepanikan yang luar biasa bagi seluruh elemen yang menjadi *"stakeholder"*. Lebih berbahaya lagi jika terjadi sabotase terhadap sistem ICT militer kita. Dalam hal ini, *"Intelligence Database"* dapat ditembus, dan lebih buruk lagi adalah bahwa sistem senjata kita dapat dilumpuhkan sebelum digunakan dalam pertempuran yang sesungguhnya. Memahami kerentanan ini tentu mempersyaratkan kita

untuk menempatkan *"security"* terhadap seluruh sistem ICT yang digunakan di negara kita, baik untuk kepentingan sipil maupun militer, sebagai prioritas utama. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa bangsa Indonesia harus semakin mandiri dalam pengembangan ICT untuk digunakan dalam menopang dan mengamankan kepentingan-kepentingan strategisnya di dalam dan luar negeri. Karena sejauh kita hanya membeli dan menggunakan sistem ICT yang didesain dan dibuat oleh pihak asing, maka sebenarnya kita selalu berada pada kondisi yang rentan terhadap gangguan dan ancaman.

Revolusi di bidang ICT juga merupakan faktor utama yang telah mempercepat dan memperluas fenomena globalisasi yang semakin mengemuka di awal abad 21 ini. Sejatinya globalisasi adalah sebuah proses yang semakin menghubungkan antar masyarakat, antar bangsa, dan antar negara di dunia. Dalam proses tersebut terjadi

perpindahan manusia, barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat lainnya, termasuk terjadi pertukaran ide, ilmu pengetahuan dan budaya. Banyak perdebatan yang bergulir di tengah-tengah masyarakat dunia, termasuk Indonesia, tentang sejauh mana globalisasi dapat membawa manfaat bagi umat manusia. Banyak pandangan yang mengungkap berbagai peluang yang telah dihadirkan oleh globalisasi, khususnya di bidang ekonomi, perdagangan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun tidak sedikit pula yang skeptis dengan mengatakan bahwa *"globalization equals westernization"*. Hal ini secara umum disebabkan karena memang dunia Baratlah yang sejak awal paling gencar menebarkan *"buzzword"* atau slogan *"globalization"* tersebut. Sejak tahun 1990an sebenarnya kita telah mendengar kata-kata globalisasi. Namun demikian seiring dengan kemajuan ICT khususnya dengan meluasnya penggunaan internet di dunia, globalisasi semakin mendapatkan perhatian.

Dalam konteks pertukaran nilai-nilai budaya tertentu, selalu ada dua kemungkinan dalam proses globalisasi ini. Kemungkinan yang pertama adalah bahwa dengan globalisasi keunggulan nilai budaya (termasuk ide, kreasi dan inovasi) suatu daerah atau komunitas tertentu dapat diangkat sebagai sesuatu yang bersifat universal dan mendunia. Sedangkan kemungkinan yang kedua, globalisasi dapat mematikan kultur sebuah masyarakat atau bangsa tertentu ketika arus pengaruh dan nilai-nilai asing yang mengalir

begitu deras tidak dapat disaring oleh masyarakat atau bangsa tersebut. Mari kita lihat beberapa contoh sederhana berikut ini terkait dengan kemungkinan yang pertama. Dengan globalisasi, tidak hanya warga Amerika Serikat, tapi juga masyarakat dunia menantikan film-film teranyar yang digarap oleh Hollywood. Industri perfilman India, Bollywood, juga semakin memiliki pengaruh yang serupa saat ini. Jepang dikenal di dunia karena industri otomotifnya yang sangat maju dan ramah lingkungan, melalui sejumlah “top brand”,



Melalui Hollywood, Amerika Serikat menebarkan pengaruhnya di dunia



Prajurit Brigif Linud 17 / 1 KOSTRAD bersama dengan masyarakat melaksanakan tarian Gangnam Style, tarian K-Pop asal Korea Selatan yang sangat populer di seluruh dunia

seperti Toyota dan Honda. “Tom Yam soup”, makanan khas Thailand, juga semakin mendunia setelah negara tersebut memberikan “soft loan” kepada warga negaranya yang membuka restoran Thailand di luar negeri. Produk-produk di bidang ICT kenamaan seperti Apple dan Blackberry juga merambah pasar dunia. Korea Selatan juga semakin populer di dunia setelah meledaknya lagu dan tarian “Gang Nam Style”. Globalisasi serta kemajuan ICT juga lah yang telah memperkenalkan Bali lebih baik lagi ke seluruh penjuru dunia sebagai

salah satu destinasi wisata impian. Sedangkan kemungkinan kedua dari implikasi globalisasi saat ini, yang sering dikhawatirkan oleh bangsa-bangsa di dunia, adalah tergerusnya nilai-nilai budaya tertentu yang telah berusia ratusan bahkan ribuan tahun lamanya oleh nilai-nilai budaya asing yang sulit untuk dibatasi. Contoh yang paling sederhana adalah terkait dengan pemaknaan nilai demokrasi dalam sebuah masyarakat tertentu. Negara-negara Barat memang sangat gencar untuk memperluas nilai-nilai demokrasi yang secara absolut mereka yakini

kebenarannya. Dalam demokrasi ala Barat terkandung nilai-nilai kebebasan atau *"freedom"* dan kesetaraan atau *"equality"* yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi dan mengekspresikan aspirasi politik mereka, termasuk memperjuangkan segala sesuatu yang mengakomodasi kepentingan mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perjalanan sejarah, kita menyaksikan berbagai upaya yang dilakukan oleh dunia Barat untuk menggabungkan demokrasi dengan sejumlah slogan seperti *"democracy is the best form of government"*, atau *"democracies do not fight one another"*¹⁶. Dan dapat diamati pula bahwa sering kali dalam upaya menggabungkan demokrasi, mereka melupakan bahwa tidak semua masyarakat atau bangsa dapat menerima nilai-nilai demokrasi ala Barat tersebut secara mentah-mentah.

Perlu dipahami bahwa terdapat

sejumlah nilai, norma dan pranata lokal tertentu yang terkadang berbeda bahkan bertentangan dengan apa yang terkandung dalam demokrasi ala Barat. Sebagai contoh terdapat sejumlah bangsa di dunia yang mengenal sistem kasta, dimana mereka meyakini bahwa setiap individu yang dilahirkan (atas dasar keturunan) akan secara otomatis berada pada kelas-kelas sosial yang berbeda antara satu sama lainnya. Dan ini akan dibawa sampai mati. Sehingga tentu akan menegaskan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Serupa dengan situasi tersebut, terdapat pula sejumlah bangsa yang memang tidak memberikan hak dan kedudukan yang sama antara pria dan wanita di dalam kehidupan sosial, termasuk kehidupan bernegara. Dalam masyarakat seperti ini pada umumnya tidak memberikan hak kepada wanita untuk memimpin pria. Tentu tidak hanya itu, berlaku pula berbagai bentuk *"inequality"* versi dunia Barat lainnya.

Dapat dimengerti jika bangsa-

bangsa tersebut menyimpan kekhawatiran bahwa globalisasi dan perkembangan ICT akan menggerus nilai-nilai budaya lokal, serta mengancam peradaban bangsa mereka. Secara alami tentu akan terjadi resistensi terhadap pengaruh asing yang diperkirakan dapat mengusik tradisi maupun kebudayaan tertentu. Mereka tentu akan berupaya maksimal untuk memproteksi nilai-nilai yang telah mereka yakini kebenarannya secara turun menurun. Dalam konteks ini, jika bangsa Barat tidak mempedulikan aspek-aspek tersebut, maka akan sangat mungkin timbul berbagai pertentangan, bahkan perlawanan, yang kadang harus diakhiri dengan perang.

Selain timbul kekhawatiran akan ancaman globalisasi terhadap nilai-nilai budaya lokal seperti yang terurai di atas, rezim globalisasi abad 21 juga meniscayakan terjadinya kompetisi yang semakin tajam antar manusia, antar organisasi, dan antar bangsa di dunia. Hanya mereka yang memiliki keunggulan lah yang dapat

menjadi pemenang. Bagaimana tidak, ketika dunia menjadi sangat *"flat"* oleh kemajuan yang sangat pesat di bidang ICT dan transportasi seperti yang kita saksikan dewasa ini, maka secara alami perpindahan manusia, barang, dan jasa akan menjadi lebih cepat dan luas. Artinya yang mulanya untuk menduduki kursi *General Manager* di sebuah perusahaan, seorang Budi dari Jakarta hanya bersaing dengan seorang Asep dari Bandung, seorang Gatot dari Semarang, seorang Simanjuntak dari Medan, seorang Komang dari Denpasar, dan seorang Maya dari Manado, maka globalisasi telah memaksa si Budi untuk juga bersaing dengan seorang Michael dari New York, seorang Chan dari Shanghai, atau seorang Ahmad dari Dubai. Artinya kita saat ini tidak hanya bersaing dengan bangsa sendiri. Suka tidak suka, siap tidak siap, di abad 21 ini kita harus juga berani dan mampu untuk berkompetisi dengan warga negara manapun. Dapat dikatakan bahwa "globalisasi tidak mengenal warna kulit". Artinya semakin hari

¹⁶ *"Democracies do not fight one another"*

Konsep ini dipopulerkan oleh Imanuel Kant, dimana diyakini bahwa negara-negara yang demokratis tidak akan menyerang satu sama lain karena punya kesamaan nilai dan tujuan bersama tentang perdamaian dan keamanan dunia.



Sebuah ilustrasi tentang bagaimana globalisasi telah menghadirkan peluang dan tantangan bagi masyarakat dunia

seseorang tidak dilihat darimana ia berasal atau dibesarkan, melainkan akan ia akan lebih dilihat dari kualitas dan keunggulan yang dimilikinya dibandingkan dengan yang lain. Sebenarnya ini merupakan sesuatu yang sangat positif jika dikaitkan dengan prinsip kesetaraan hak bagi setiap manusia. Prinsip ini dengan sendirinya akan meniadakan kelas-kelas sosial yang terdapat di sejumlah masyarakat dunia. Oleh karena itu setiap individu harus senantiasa membangun

kapasitasnya, melengkapi dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjawab berbagai tantangan profesi di abad 21 ini. Dalam konteks yang lebih luas, situasi ini juga berlaku bagi semua organisasi, termasuk dunia bisnis. Dalam era pasar bebas, telah memungkinkan setiap perusahaan untuk mengembangkan kekuatan dan pengaruh bisnisnya ke seluruh penjuru dunia. Nama-nama besar seperti Microsoft,

IBM, Samsung, Citi Bank, BMW, Walt Disney, Coca Cola, atau McDonald, sangat “familiar” di tengah-tengah kita. Ini adalah bentuk kompetisi di era global dewasa ini, dimana setiap perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif melalui kualitas produk barang maupun jasa yang mereka tawarkan dapat merambah dunia. Tanpa disadari, sebenarnya dengan meluasnya pengaruh bisnis perusahaan-perusahaan besar tersebut di berbagai kawasan di dunia, telah memperkuat pengaruh bangsa atau negara asal mereka dalam percaturan politik internasional. Dan ini merupakan salah satu bentuk dari implementasi “soft power” di era modern.

Lalu pertanyaannya, “bagaimana dengan Indonesia; apakah Indonesia telah siap menghadapi pasar bebas; dan apakah Indonesia memilih untuk menjadi pemenang atau pecundang dalam era globalisasi ini?” Jawabannya tentu tidak sederhana. Yang jelas seluruh komponen bangsa Indonesia harus

mau merefleksi diri serta membuka cakrawala pandang yang luas dan jauh ke depan. Kita tidak boleh terperangkap dalam perdebatan panjang yang memposisikan globalisasi sebagai ancaman bagi bangsa kita. Kita hanya akan diam di tempat, kehabisan waktu dan energi, sedangkan bangsa-bangsa lain telah berlari dan berkejaran untuk memenangkan kompetisi pasar bebas baik di kawasan masing-masing maupun di dunia. Tidak ada bangsa yang mampu menolak globalisasi. Oleh karena itu hanya ada satu opsi, yaitu sebagai bangsa kita harus senantiasa berpikir dan berbuat untuk meningkatkan daya saing yang kita miliki. Kita cukup bersyukur karena Indonesia memiliki kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam yang telah memberikan kita keunggulan komparatif selama ini. Namun demikian, kita juga harus bijak untuk menyadari bahwa sumber daya alam sifatnya tidak tak terbatas. Oleh karena itu bangsa Indonesia harus lebih fokus untuk menggali berbagai potensi

yang akan menjadi keunggulan kompetitif kita dibandingkan dengan bangsa dan negara lain di sekitar kita. Keunggulan kompetitif yang dihasilkan melalui ide, kreasi, dan inovasi, merupakan sesuatu yang tidak terbatas. Apabila kita cerdas dan adaptif dalam mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan mampu merubah segala tantangan globalisasi menjadi peluang-peluang yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia secara keseluruhan. Untuk ini semua, bangsa Indonesia harus menyatukan visi, bersatu, untuk kemudian bersama-sama mengimplementasikan visi tersebut dalam aksi-aksi nyata. Tentu segala sesuatunya dilakukan dalam sebuah skema besar yang tersinkronisasi dengan baik, di tingkat nasional maupun daerah, pada tataran makro maupun mikro. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa dalam semangat kebersamaan tersebut, setiap warga negara Indonesia harus memiliki *"mindset"* bahwa dalam era globalisasi yang menjadi saingan utama kita sebenarnya adalah

"foreign state and non-state actors or powers". Dengan menyadari hal ini, maka sebagai bangsa kita tentu akan terus berupaya yang terbaik untuk menjadi bangsa pemenang di abad 21.

7 MILIAR PENDUDUK DUNIA : KELANGKAAN, KOMPETISI, DAN SUMBER KONFLIK DI ABAD 21

Bumi tempat tinggal kita semakin lama terasa semakin padat. Pertumbuhan penduduk dunia yang begitu pesat telah menghadirkan begitu banyak tantangan, yang



Dengan 7 miliar manusia, dunia akan semakin kompetitif

jika tidak dapat kita antisipasi dengan cepat dan tepat maka dapat berubah menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup manusia. Hanya dalam waktu kurang lebih 200 tahun, jumlah penduduk dunia bertambah dari 1 miliar di tahun 1800-an menjadi 7 miliar di akhir tahun 2011. Fakta ini adalah sesuatu yang fenomenal. Bertambahnya populasi dunia yang begitu cepat dalam kurun waktu yang relatif singkat ini dimungkinkan oleh sejumlah faktor. Namun yang paling utama adalah terkait dengan semakin tingginya angka harapan hidup atau *"life expectancy"* rata-rata penduduk dunia. Semakin baiknya pemenuhan gizi manusia serta kemajuan yang begitu pesat di dunia medis (kesehatan), secara umum telah meningkatkan kualitas hidup manusia. Kualitas hidup yang semakin baik dari waktu ke waktu tersebut berimplikasi pada semakin tingginya angka harapan hidup, dan sebaliknya telah memperlambat angka kematian manusia. Lalu pertanyaannya adalah apa implikasi dari dunia yang semakin padat ini? Jawabannya adalah

kelangkaan, atau *"scarcity"*. Jika dikaitkan antara 7 miliar manusia dengan luas wilayah daratan bumi yang dapat dihuni, maka sebenarnya kita masih memiliki ruang yang cukup luas. Dalam sebuah simulasi, untuk dapat mengakomodasi 7 miliar manusia (berdiri secara berhimpitan, bahu bertemu bahu) ternyata kita hanya membutuhkan tanah seluas kota Los Angeles, negara bagian California, Amerika Serikat, yang berukuran kurang lebih 1,2 juta km². Artinya sekali lagi bukanlah *"space"* yang menjadi permasalahan di sini. Yang menjadi permasalahan utama adalah bahwa untuk dapat menghidupi populasi dunia yang semakin besar tersebut maka kita akan membutuhkan sumber daya alam yang semakin besar pula. Padahal kita mengetahui bahwa sumber daya alam yang terkandung dalam bumi kita tidak tak terbatas. Artinya implikasi terbesar dari semua ini adalah akan terjadinya kompetisi yang semakin sengit untuk memperebutkan sumber-sumber alam yang menjamin kelangsungan hidup seluruh manusia dan bangsa

di dunia. Dan *trend* ini tidak hanya berhenti di awal abad 21. Dengan pertumbuhan penduduk yang bersifat “*exponential*” ini, kita dapat memproyeksikan bahwa dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama (dalam perspektif sejarah bumi), angka 7 miliar akan berubah menjadi 10 miliar di akhir abad 21¹⁷. Apakah kita harus khawatir dengan situasi yang berkembang ini? Ya, kita tidak boleh mengabaikan fenomena di atas. Kita akan menjadi generasi yang tidak bertanggung jawab jika kita hanya memikirkan apa yang terbaik untuk kita, tanpa memperdulikan nasib anak-cucu kita, generasi-generasi penerus kita.

Terdapat sebuah paradoks yang menyedihkan. Ketika secara umum kualitas hidup manusia meningkat, seperti yang telah dibahas sebelumnya, kesenjangan hidup masih terjadi (bahkan dalam sejumlah hal terasa semakin tajam) antara masyarakat negara-negara maju dengan masyarakat negara-

negara berkembang di berbagai belahan dunia, khususnya di Afrika dan Asia. Globalisasi ternyata juga berpotensi membuat si kaya menjadi semakin kaya dan si miskin menjadi semakin miskin. Hari ini, ketika *GDP per capita (Purchasing Power Parity)* negara Amerika Serikat¹⁸ mencapai hampir \$50.000,00 dan Uni Eropa di sekitar angka \$31.000,00, terdapat kurang lebih 925 juta manusia (mendekati jumlah populasi negara Amerika Serikat dan benua Eropa digabungkan) hidup dalam kelaparan atau kekurangan gizi atau “*undernourished*”. Di samping itu masih terdapat sekitar 885 juta manusia (atau hampir 13% penduduk dunia) tidak memiliki akses terhadap air bersih untuk minum¹⁹. Dan dari angka tersebut dikalkulasi bahwa dalam setiap



Kelangkaan pangan terjadi di sejumlah negara di dunia

¹⁷ Lihat lebih lanjut pada artikel Huffington Post.

¹⁸ Sumber merujuk pada World Bank.

¹⁹ Lihat lebih lanjut pada laporan Epic Group dan Caritas.

menit terdapat 7 orang di dunia yang harus mati karena kekurangan air minum. Sedangkan 38% penduduk dunia tercatat tidak dapat memenuhi kebutuhan sanitasi yang layak²⁰. Belum lagi jika kita berbicara tentang sumber energi yang tidak tergantikan. Cadangan minyak bumi, begitu pula sumber energi lainnya, semakin hari semakin menipis. Dengan tingkat konsumsi yang semakin tinggi, untuk kepentingan rumah tangga sampai dengan proyek-proyek industri berskala besar, maka dapat dipastikan bahwa kompetisi untuk memperebutkan sumber-sumber energi dunia akan menjadi semakin keras. Apalagi di abad 21 ini telah muncul sejumlah “*emerging economies*” yang masuk ke dalam klub-klub elit seperti G-20, BRIC (*Brazil, Russia, India dan China*) dan EAGLE (*Emerging and Growth-Leading Economies*). “*Emerging economies*” tersebut berupaya untuk mengejar ketertinggalan mereka di bidang ekonomi dari negara-negara yang lebih dulu maju di dunia. Untuk dapat melakukan pembangunan

infrastruktur secara agresif misalnya, mereka sangat membutuhkan sumber energi dalam jumlah yang besar. Di satu sisi, negara-negara yang tergolong kaya sumber energi (khususnya minyak) akan dapat memainkan harga pasaran dunia ketika memang jumlah permintaan atau “*demand*” jauh melampaui jumlah persediaan atau “*supply*”.

Kelangkaan-kelangkaan terhadap pangan, air bersih, maupun sumber energi tersebut tidak hanya menimbulkan berbagai permasalahan sosial suatu bangsa secara internal, namun juga berpotensi menimbulkan ketegangan-ketegangan baru, yang berujung pada konflik antar negara. Setiap manusia pada dasarnya memiliki “*instinct for survival*” dalam rangka mempertahankan hidupnya. Ketika kebutuhan dasar untuk hidup, yaitu makan dan minum tidak dapat terpenuhi, maka “*instinct for survival*” tersebut akan muncul secara berlebihan. Dan dihadapkan dengan sangat terbatasnya sumber makanan dan air minum yang mereka

²⁰ Lihat lebih lanjut pada laporan ACS.

butuhkan dan perebutkan, maka yang berlaku adalah hukum rimba, *"survival of the fittest"*, siapa kuat, dia menang". Jika ini mendominasi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, maka dapat diprediksi bahwa konflik horizontal akan sangat mungkin terjadi. Di samping itu warga suatu negara yang merasakan pahitnya kehidupan secara absolut sangat mungkin untuk menyalahkan pemerintahnya sebagai yang paling bertanggung jawab. Dalam sekejap jeritan hati dapat berubah menjadi teriakan-teriakan dalam



Demonstrasi menolak kenaikan harga BBM

sebuah demonstrasi damai, dan dalam sekejap pula demonstrasi damai tersebut dapat berubah menjadi sesuatu yang anarkis. Jika tidak dikelola dengan baik, maka dapat terjadi suatu pergolakan,

pemberontakan, dan penggulingan terhadap pemerintah yang sah. Ketika ini semua terjadi, maka pertumpahan darah tidak dapat terelakkan. Situasi menjadi jauh lebih kompleks, ketika perebutan sumber pangan dan air bersih terjadi di sekitar perbatasan antara dua atau lebih negara. *"Spillover effect"* yang terjadi, akan dapat memicu konflik antar negara.

Sama halnya dengan perebutan sumber energi yang tak tergantikan di masa kini dan yang akan datang. Dengan teknologi yang terus dikembangkan, sebenarnya sudah dapat dipetakan bagian-bagian bumi yang memiliki potensi dan cadangan strategis sumber daya alam dan mineral. Atas dasar tersebut, kerjasama antar negara produsen dan konsumen dalam formulasi *"strategic partnership"* semakin dikembangkan. Namun demikian, kita mengetahui bahwa sebagian kekayaan bumi berada pada teritorial (darat maupun perairan) yang masih menjadi sengketa antar negara. Sebagai



Peta Asia yang menunjukkan sejumlah potensi konflik di abad 21

contoh perairan Laut China Selatan, yang memiliki kandungan minyak dan gas bumi yang sangat besar, sampai dengan hari ini diperebutkan oleh 6 *"claimants"*, yaitu China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Dan lokasi sengketa ini berada di beranda terdepan negara kita. Artinya secara formal memang Indonesia tidak menjadi bagian dari sengketa Laut China Selatan, namun jika ditinjau dari aspek geografi maka sangat memungkinkan terjadinya *"spillover effect"* yang merugikan bangsa kita.

Tidak menutup kemungkinan, jika upaya-upaya diplomatik dinyatakan tidak efektif dalam menyelesaikan sengketa antar negara tersebut, maka kekuatan militer akan digunakan untuk mengamankan kepentingan suatu negara dalam mencari dan menguasai sumber energi baru. Kita tentu tidak ingin jika ada bagian negeri ini yang dijadikan sebagai arena konflik bersenjata antara negara-negara di sekitar kita.

Dengan demikian tidaklah berlebihan jika kita menetapkan bahwa perebutan sumber energi merupakan salah satu sumber konflik abad 21 yang paling berbahaya.

MENJADI BAGIAN DARI SOLUSI, BUKAN BAGIAN DARI PERMASALAHAN

Mencermati ini semua maka yang harus kita lakukan sebagai generasi muda bangsa, apapun profesi yang kita geluti, adalah untuk senantiasa berupaya menjadi bagian dari solusi dan bukan menjadi bagian dari permasalahan. Yang pertama, sebelum kita dapat melakukan sesuatu yang lebih besar dan sebelum kita dapat mempengaruhi orang lain, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Setelah kita memahami berbagai implikasi dari semakin bertambahnya jumlah manusia, dimana negara kita (memiliki jumlah penduduk sekitar 230 juta orang, nomor 4 terbesar di dunia) menjadi salah satu kontributor utama dari pertumbuhan penduduk dunia

selama ini, maka kita tidak boleh berdiam diri.²¹ Kita dapat melakukan sesuatu mulai dari sekarang. Sebagai contoh, dalam keseharian kita dapat menjadi contoh dan mempengaruhi lingkungan kita untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak, listrik, dan sumber-sumber energi lainnya. Kita juga harus dapat menggunakan air bersih secara efisien. Di samping itu, kita juga dapat menjadi pelopor dalam rangka menjamin ketahanan pangan di seluruh wilayah tanah air. Insya Allah jika kita dapat mengawali dari lingkup terkecil, yaitu keluarga dan lingkungan masyarakat di sekitar kita, maka kita dapat mempengaruhi lingkup yang lebih luas, yaitu seluruh komponen bangsa. Dan bukannya sesuatu yang mustahil, jika kita memiliki *"determination"* yang kuat, maka sebagai bangsa kita dapat mempengaruhi bangsa-bangsa lain di dunia untuk turut memikirkan masa depan generasi-generasi selanjutnya.

²¹ Lihat lebih lanjut pada laporan World Bank.

Selain berbagai upaya penghematan dan penggunaan sumber energi secara tepat guna, kita harus senantiasa berpikir *"outside the box"*. Artinya sejak dini mari kita membiasakan melihat segala sesuatunya dari berbagai perspektif. Kita tidak boleh menyerah dengan realitas, dan justru kita harus cerdas untuk melihat peluang-peluang yang dapat kita eksplorasi lebih jauh. Bangsa besar adalah bangsa yang dapat merubah tantangan menjadi peluang. Kita harus meyakini bahwa selalu ada kata solusi dalam setiap permasalahan. Namun itu semua hanya akan didapatkan jika kita mau serius dan bekerja keras. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, sangat memungkinkan bagi kita untuk menghadirkan sejumlah sumber energi alternatif, sebagai substitusi sumber energi tak tergantikan yang semakin lama semakin berkurang, baik kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai contoh, dewasa ini pemerintah kita secara serius

mencoba mengembangkan sistem transportasi bertenaga listrik. Ini merupakan sebuah terobosan, yang jika berhasil maka akan menjadi solusi dalam upaya mengurangi jumlah konsumsi bahan bakar minyak.

Di bidang yang lain, pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan juga harus bergerak mengikuti kemajuan di bidang teknologi agrikultur. Jika pemerintah, para ilmuwan, serta para petani dan nelayan kita dapat duduk bersama, maka kita dapat menghasilkan berbagai jenis bibit unggulan bahan makanan pokok yang dapat menjamin ketahanan pangan nasional. Tentu selain inovasi yang harus terus kita lakukan, tantangan utama lainnya adalah terkait dengan penyesuaian cara berpikir dan cara hidup kita sehari-hari. Adalah sesuatu yang wajar jika terjadi resistensi terhadap perubahan-perubahan dalam kehidupan kita, walaupun sesungguhnya perubahan tersebut

membawa manfaat dan nilai yang lebih tinggi. Namun dengan upaya-upaya yang gigih maka generasi muda Indonesia dapat membawa bangsa kita ke arah yang lebih baik, lebih makmur, lebih maju, dan lebih modern.

“HOPE FOR THE BEST, BUT PREPARE FOR THE WORST”

Lalu bagaimana kalau itu semua sudah kita lakukan, namun kita tetap dihadapkan pada potensi terjadinya konflik dengan pihak asing yang secara agresif berupaya untuk merebut dan menguasai sumber-sumber daya alam yang kita miliki? Terhadap pertanyaan semacam ini kita harus menjawabnya dengan tegas, bahwa sebagai negara yang berdaulat kita tidak akan pernah membiarkan terjadinya intervensi dan aksi agresi asing, baik secara politik maupun fisik, dalam rangka merebut dan menguasai sumber-sumber daya alam kita. Ini harga mati. Tentu kita

tetap memegang prinsip bahwa perang merupakan jalan terakhir, atau *“war as the last resort”*, ketika segala upaya damai yang telah dikerahkan menemui jalan buntu. Namun demikian bangsa kita adalah bangsa yang besar, bangsa pejuang, yang siap berperang demi menegakkan keutuhan dan kedaulatan negaranya. Bagi kita yang berada di militer, skenario-skenario terburuk harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Artinya memang inilah tugas pokok kita, untuk mengantisipasi segala *“worst-case scenarios”* yang mempersyaratkan penggunaan kekuatan militer. Dengan demikian, walaupun dalam prediksi jangka pendek tidak didapatkan kekuatan militer asing yang secara aktual menjadi ancaman bagi Indonesia, kita tidak boleh berasumsi bahwa negara kita di abad 21 ini akan selalu berada dalam situasi damai atau *“peacetime”*, dimana segala sesuatunya akan berjalan secara normal sesuai dengan yang kita

harapkan. Jargon *“hope for the best, but prepare for the worst”* harus senantiasa melekat pada diri perwira militer, dari Jenderal sampai dengan Letnan, dari perumus kebijakan pertahanan dan strategi militer sampai dengan komandan peleton di lapangan. Oleh karena itu dalam praktiknya, latihan-latihan militer yang kita selenggarakan, dari level terendah sampai dengan latihan gabungan antar matra TNI, harus dihadapkan pada skenario-skenario yang realistis, dan dengan semangat untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk tadi. Dengan demikian diharapkan seluruh prajurit memiliki kesiapan fisik dan mental, serta pemahaman yang utuh terhadap apa yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang, baik berupa ancaman yang paling mungkin (*most likely*) maupun yang paling berbahaya (*most dangerous*). Prajurit kita tidak boleh untuk tidak mengetahui dirinya sendiri, baik kekuatan maupun kelemahannya.

Dan prajurit kita juga tidak boleh untuk tidak mengetahui siapa yang akan berpotensi menjadi lawan-lawannya di medan pertempuran. Sun Tzu secara bijak mengatakan *“ketahui dirimu, dan kenali lawanmu, sehingga seribu kali kau bertempur, maka seribu kali pula kau akan memenangkannya”*. Kata-kata ini memiliki makna yang sangat dalam, dan jika kita kembalikan pada proses untuk mempersiapkan kekuatan bertempur kita yang handal, maka seharusnya kita tidak boleh dengan mudah melakukan *“pro-memori”* pada latihan-latihan kita. Sekali lagi jika latihan dapat diselenggarakan secara utuh, maka kita dapat secara obyektif mengkalkulasi kekuatan kita dihadapkan dengan kekuatan potensi lawan kita. Pada prinsipnya, daya tempur, atau *“combat power”* yang sesungguhnya baru dapat dihitung jika kita benar-benar mau mensimulasikan segala sesuatunya secara utuh sesuai dengan apa yang kita miliki dan tidak kita miliki saat ini, dihadapkan dengan potensi

lawan kita dengan menggunakan variabel yang sama. Semua upaya di atas tentunya diarahkan pada pencapaian tugas pokok kita, yaitu untuk memenangkan pertempuran dan peperangan (aspek militer), dalam rangka menjaga kedaulatan negara yang kita cintai.

PENUTUP

Mengakhiri tulisan ini saya sebagai generasi muda TNI sungguh berharap bahwa institusi yang kita cintai bersama ini akan senantiasa menjadi bagian penting dalam berbagai solusi permasalahan bangsa. Hanya dengan kerja keras dan keinginan kuat untuk berbuat yang terbaik dalam setiap bentuk pengabdian, kita bersama dengan komponen bangsa lainnya dapat menjadi patriot-patriot yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih

bermartabat. Bangsa Indonesia harus berani keluar dari “*comfort zone*”, membangun kapasitas dirinya, sehingga siap untuk meraih segala peluang serta menjawab berbagai tantangan di abad 21 yang begitu kompleks dan penuh dengan ketidakpastian.

“ HANYA DENGAN **KERJA KERAS** DAN **KEINGINAN KUAT** UNTUK BERBUAT YANG TERBAIK DALAM SETIAP BENTUK PENGABDIAN, KITA BERSAMA DENGAN KOMPONEN BANGSA LAINNYA DAPAT MENJADI **PATRIOT-PATRIOT** YANG MAMPU MEMBAWA INDONESIA KE ARAH YANG LEBIH BAIK, LEBIH MAJU, DAN LEBIH BERMARTABAT. BANGSA INDONESIA HARUS BERANI **KELUAR DARI “COMFORT ZONE”**, MEMBANGUN **KAPASITAS** DIRINYA, SEHINGGA SIAP UNTUK MERAHAI SEGALA **PELUANG** SERTA MENJAWAB BERBAGAI **TANTANGAN** DI ABAD 21 YANG BEGITU **KOMPLEKS** DAN PENUH DENGAN **KETIDAKPASTIAN**”

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

